

# PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT

Sekretariat Daerah Kota Depok



**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR : Kep/41/Renstra/Adm/2019****TANGGAL : 26 APRIL 2019****PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021**

# **BAB-I**

## **Pendahuluan**

---

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 26 April 2019 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor: Kep/41/Renstra/Adm/2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Sekretariat Daerah Kota Depok melakukan review dan revisi terhadap Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

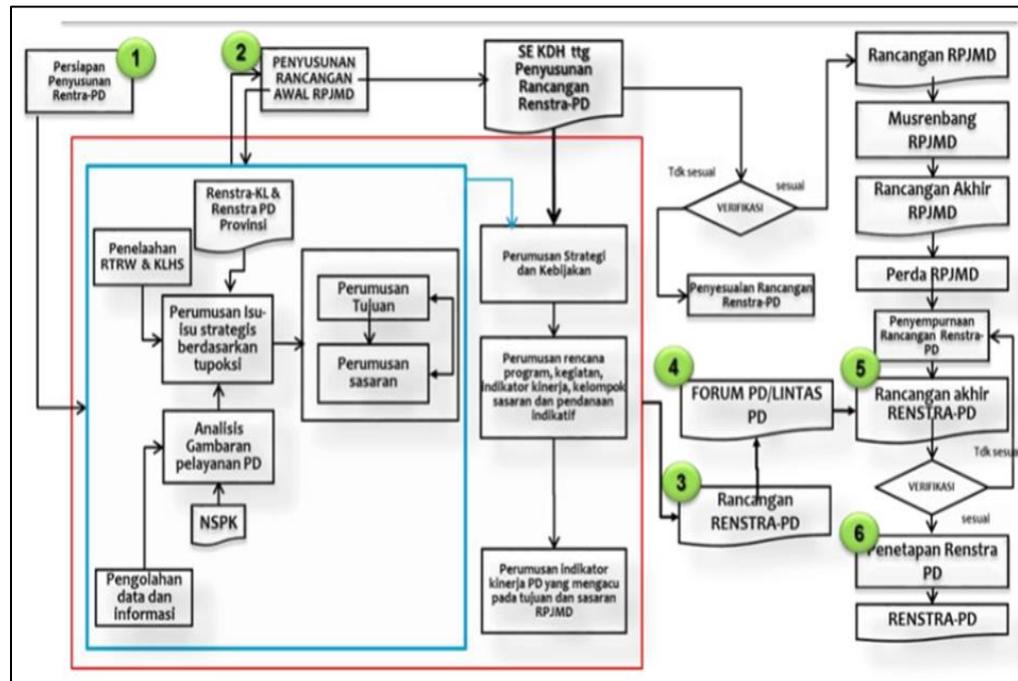
Perubahan Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;

Perubahan Kedua Renstra Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok mengacu pada RPJMD Kota Depok, maka secara otomatis Renstra Sekretariat Daerah juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kota Depok, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra



Penyusunan perubahan kedua Renstra Sekretariat Daerah pada prinsipnya sama dengan penyusunan renstra perubahan yang dimulai dari pembentukan tim penyusunan renstra yang terdiri dari ketua, sekretaris dan kelompok kerja yang terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian yang membidangi perencanaan serta pelaksana terkait yang ada di Sekretariat Daerah serta beberapa unsur Perangkat Daerah lain yang terkait seperti : BAPPEDA, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah. Kemudian dilakukan persamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen renstra dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan yang diperlukan dalam menyusun renstra. Setelah itu dilakukan penyusunan agenda kerja tim renstra dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan informasi.

Proses penyusunan renstra perubahan tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan rancangan renstra yang terdiri dari :

- 1) Tahap perumusan rancangan renstra dimana salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan renstra adalah rancangan awal perubahan RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai PD untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait
- 2) Tahap penyajian Rancangan Renstra PD, disusun secara sistematis.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah diundangkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan

- Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
  18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Walikota Depok Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Depok;
25. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
26. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok;
27. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai arahan dan menjadi rancangan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
- b. Menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok;
- c. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Depok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
- e. Sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

1. Memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan;

2. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Sekretariat Daerah saat ini dan target yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra. Selain itu juga dijelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; Maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan;

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah dimasa datang;

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT**

#### **DAERAH**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, Telaahan Visi, Misidan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok;

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang;

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah dari Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang;

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan pada Sekretariat Daerah Kota Depok yang disajikan dengan menggunakan tabel;

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini berisi arah Kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota Depok, yang memuat indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yang disajikan dengan menggunakan Tabel serta berisi Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang menunjang RPJMD Kota Depok

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB-II

# Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

---

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016) yang uraian tugas pokok dan fungsinya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 100 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu walikota dalam Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;

- d. penyelenggaraan pembinaan Teknis Administratif kepada Inspektorat;
- e. penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama, Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum, dan Kesejahteraan Sosial serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;

- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan produk hukum, pemberian Bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- c) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan Produk Hukum, pemberian bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- d) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari:

- 1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - c) Sub Bagian Kerjasama.
- 2) Bagian Hukum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
  - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 3) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Administrasi Sosial;
  - b) Sub Bagian Pelayanan Sosial; dan
  - c) Sub Bagian Pemberdayaan dan Keagamaan.
  
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, badan usaha milik daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataanruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa;
- c) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

- 1) Bagian Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja

dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan

membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

- ✓ Sub Bagian Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- ✓ Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usaha Milik Daerah; dan
- ✓ Sub Bagian Pangan dan Koperasi.

- 2) Bagian Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan administrasi pembangunan, pengendalian kegiatan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

- ✓ Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
- ✓ Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
- ✓ Sub Bagian Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

- 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

- ✓ Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- ✓ Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- ✓ Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi dan Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, keprotokolan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi: Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; Badan Keuangan Daerah; Inspektorat Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Asisten Administrasi Dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;

- c) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;
- d) Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Administrasi dan Umum, membawahkan 4 (empat) Bagian terdiri dari :

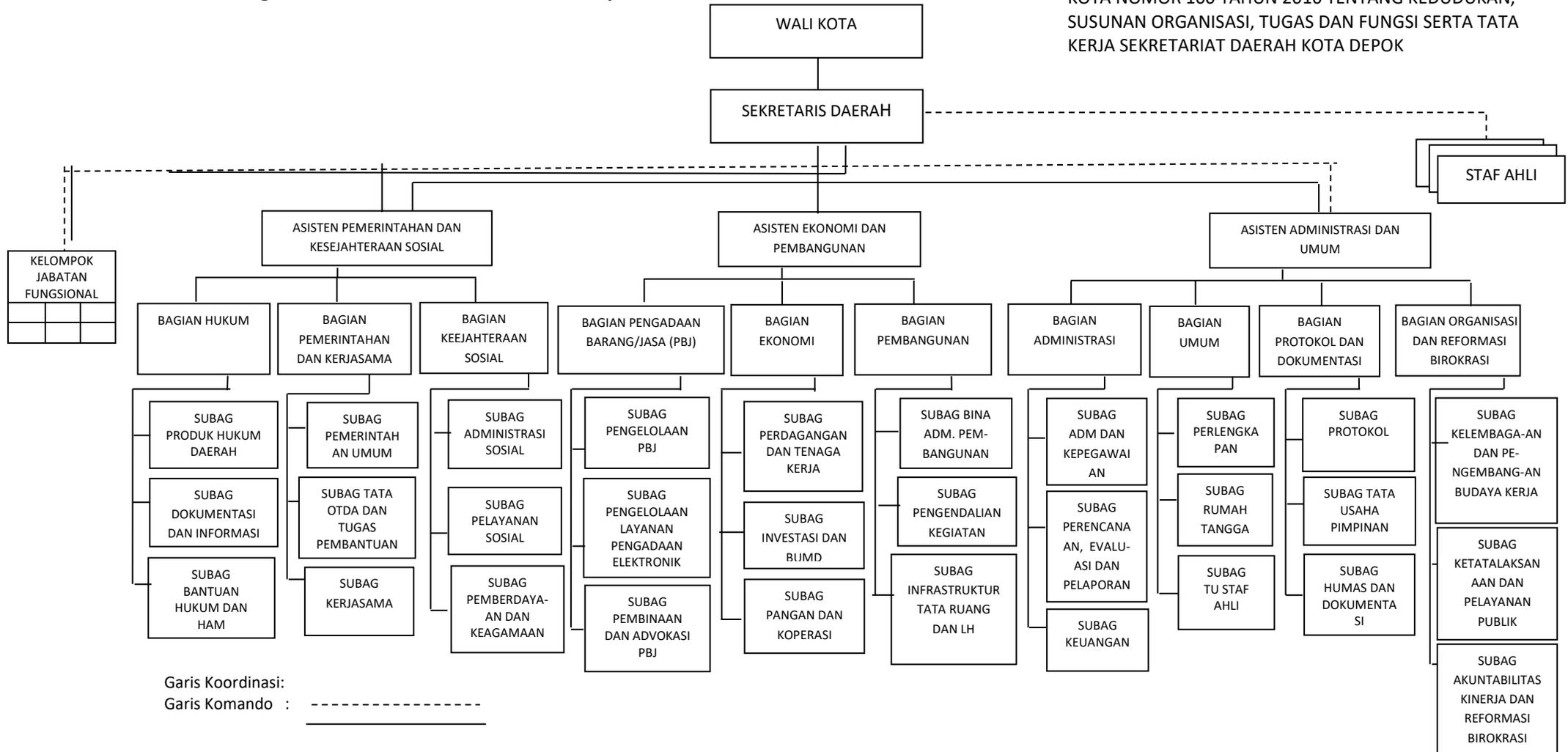
- 1) Bagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - ✓ Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
  - ✓ Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - ✓ Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Staf Ahli, Bagian umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - ✓ Sub Bagian Perlengkapan;

- ✓ Sub Bagian Rumah Tangga;
  - ✓ Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
- 3) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan bidang evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
- ✓ Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja;
  - ✓ Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
  - ✓ Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 4) Bagian Protokol dan Dokumentasi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistic serta bidang keprotokolan dan dokumentasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
- ✓ Sub Bagian Protokol;
  - ✓ Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  - ✓ Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional. mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan. dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebagaimana dimaksud terdapat pada Gambar.2.1.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
 NOMOR : 89  
 TAHUN : 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI  
 KOTA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok**



Selain itu terdapat pula Staf Ahli Walikota merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2016. Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota dalam bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Sumber Daya Manusia dan Masyarakat, serta bidang Ekonomi dan Keuangan. Adapun fungsi Staf Ahli adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konseptual, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan walikota;
3. Pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah pemerintahan daerah dari aspek hukum dan politik, aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek masyarakat dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota.

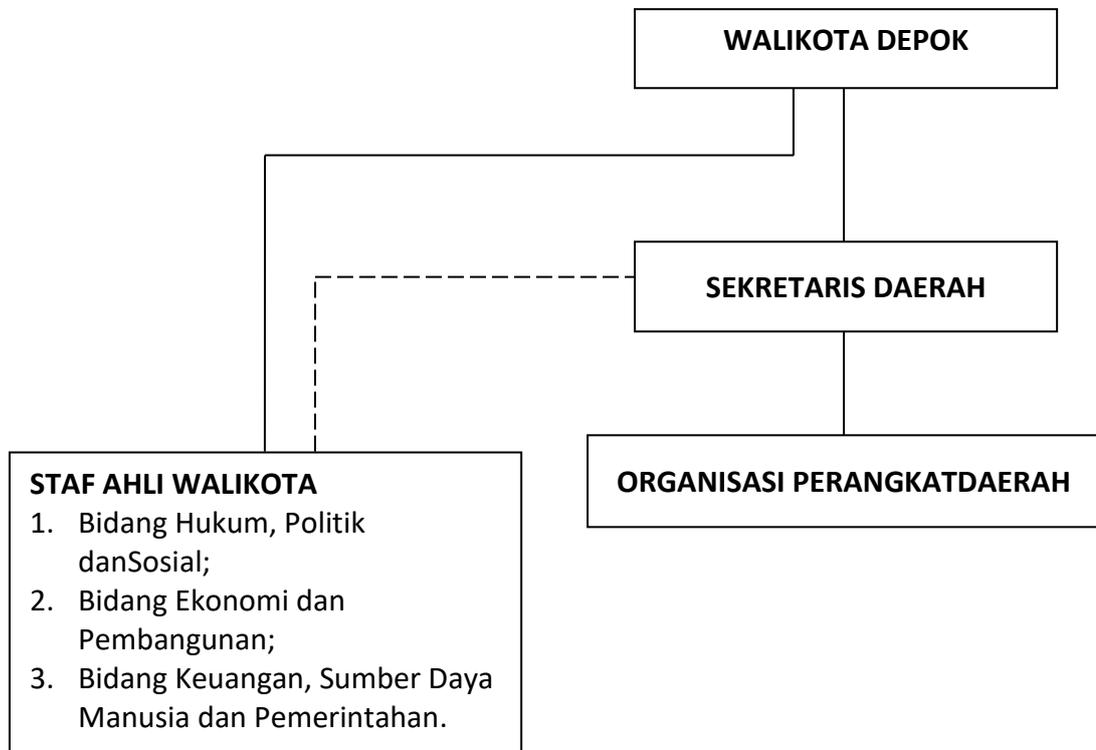
Staf Ahli dapat diberikan tugas lain oleh Walikota meliputi :

- a. Melakukan penyeliaan/pendampingan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota;
- b. Memberikan pertimbangan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pemerintah kota;

- c. Membantu monitoring terhadap efektifitas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- d. Mendampingi atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar rapat-rapat di tingkat lokal, regional maupun nasional;
- e. Mendampingi atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan dan atau non kedinasan;
- f. Melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato/sambutan Walikota;
- g. Tugas lain dan khusus yang diamanatkan Walikota.

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana dimaksud pada Gambar 2.2.

**Gambar.2.2**  
**Struktur dan Kedudukan Staf Ahli Kota Depok**



Keterangan :

- : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

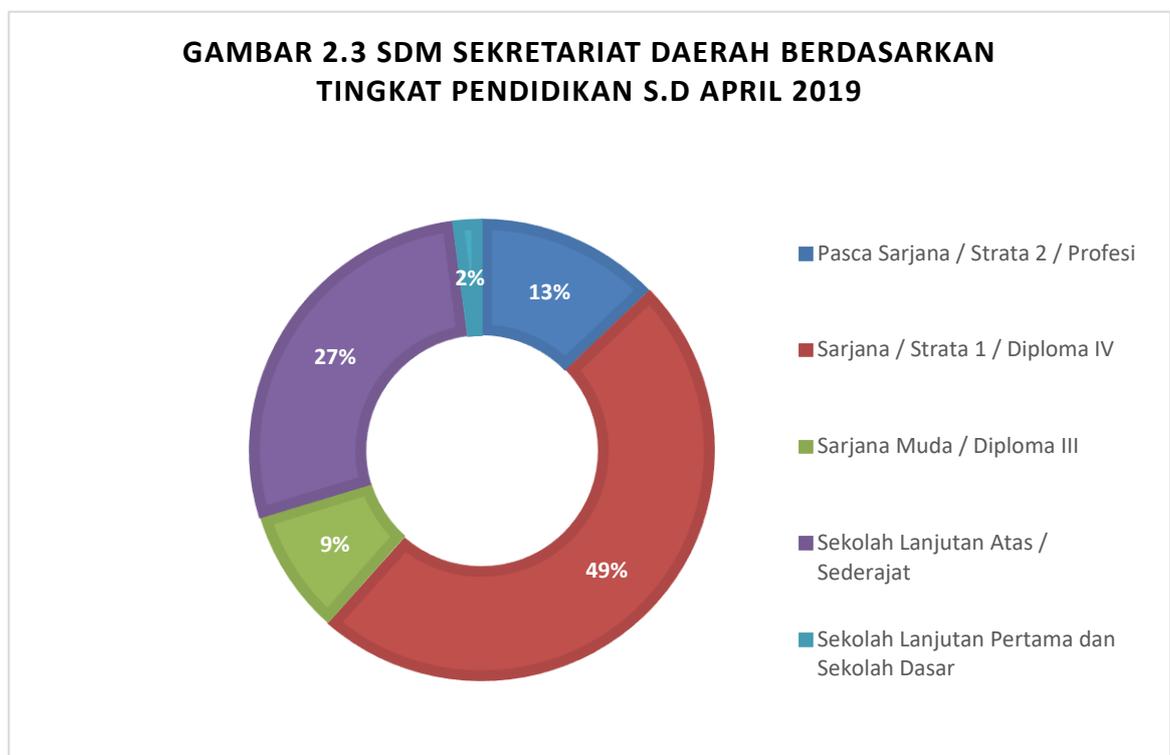
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, Sekretariat Daerah mengurus 1 (satu) urusan, yaitu pendukung urusan pemerintahan.

Dengan adanya perubahan RPJMD pada tahun 2017 maka program yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah untuk melaksanakan kedua urusan diatas juga menyesuaikan. Pada tahun 2018 sd 2021 Sekretariat daerah melaksanakan 13 program yaitu:

1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika
4. Peningkatan Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan
7. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
9. Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
10. Peningkatan Layanan KDH dan WKDH
11. Pembentukan Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM
12. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
13. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

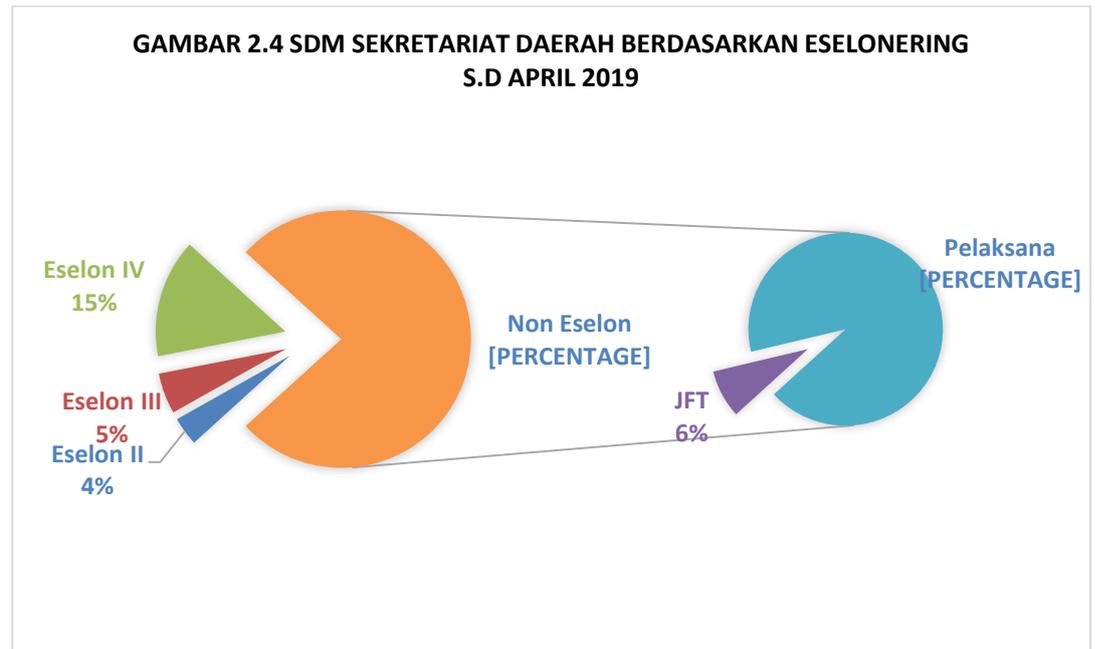
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung oleh 195 orang pegawai. Rincian pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Eselon sampai dengan April 2019 yang diambil dari data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 2.3, Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 berikut.



Sumber :Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kota Depok, April 2019

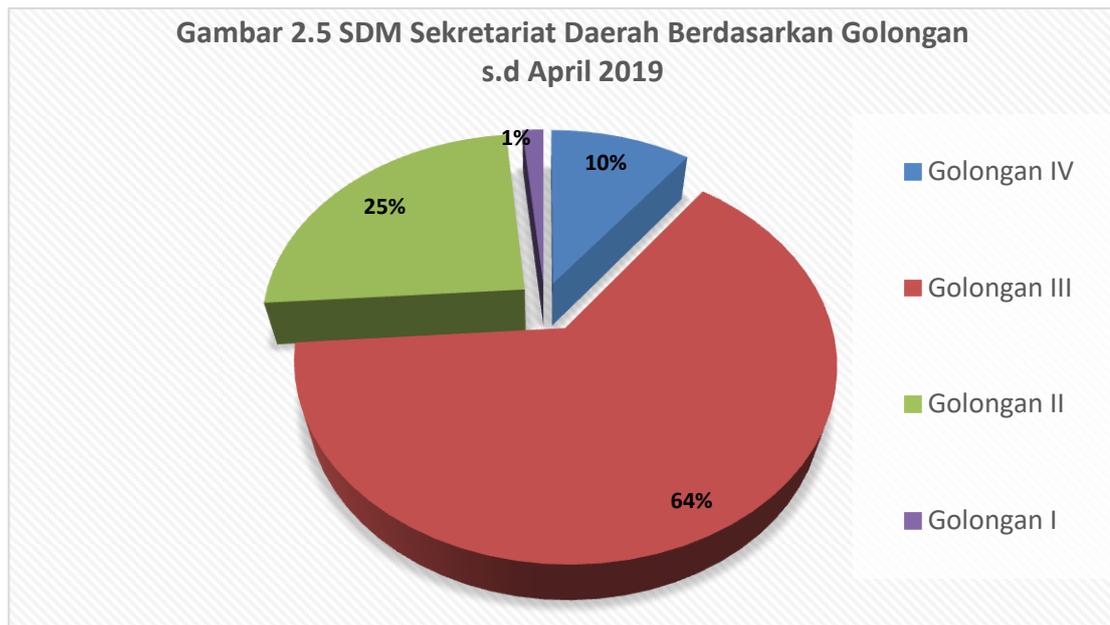
Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan hampir sebagian besar pegawai Sekretariat Daerah adalah Sarjana/Strata 1 yang mencapai 49% atau 95 orang, sedangkan persentase terendah pada tingkat pendidikan rendah yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Hal ini juga dikarenakan telah dilaksanakannya penyesuaian ijazah beberapa

orang ASN yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas pegawai Sekretariat Daerah Kota Depok cukup memadai. Adapun sebaran pegawai berdasarkan Golongan dan Eselonering dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kota Depok

Dari 149 orang non eselon/pelaksana terdapat 12 (dua belas) orang diantaranya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari : 6 (enam) orang Fungsional Pengadaan Barang, Jasa Pertama dan 2 (dua) orang Pranata Hubungan Masyarakat Pertama dan 3 (tiga) orang Pranata Komputer serta 1 (satu) orang Analis Kebijakan. Diharapkan Jabatan Fungsional lainnya segera terbentuk dan didistribusikan ke Sekretariat Daerah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Sekretariat Daerah.



Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kota Depok

Selain ditunjang oleh Sumberdaya Aparatur sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Sekretariat Daerah didukung pula dengan sarana dan prasana sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja. Sarana dan prasarana tersebut antara lain yaitu kendaraan bermotor sebagai pendukung kegiatan operasional aparatur yang terdiri atas 71 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), 141 unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam)/ bus. Pimpinan beserta 9 (sembilan) bagian menempati gedung kantor sendiri yang terdiri dari 5 (lima) lantai dan 1 (satu) kantor untuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP) yang berada di terpisah yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja

yang cukup memadai. Rekapitulasi Saran dan Prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Depok s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel. 2.1**  
**Sarana dan Prasana Lingkup Sekretariat Daerah**

No	Uraian	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan roda 4 atau lebih	51
2.	Kendaraan roda 2	106
3.	Komputer (PC/Notebook/ Laptop dan Tablet)	467
4.	Printer	362
5.	Scanner	14
6.	Server	5
7.	Router / Hub / Modem / Switch / LAN / Kabel UTP	19
8.	LCD/Proyektor/Infokus	48
9.	Layar Proyektor	7
10.	Hard Disk	65
11.	External CD/ DVD Drive (ROM) / DVD Room	36
12.	Door Access Control / Wireless Access Point	34
13.	Mesin Penghancur Kertas	42
14.	Mesin Absen	34
15.	Mesin Fotokopi	3
16.	Mesin Tik	17
17.	Mesin Penghitung Uang	2
18.	Lemari / Rak / Filling Cabinet / Brandkas	230
19.	Meja Kerja / Meja Rapat / Meja Resepsionis / Meja Kayu	226
20.	Kursi Kerja / Kursi Rapat / Kursi Tamu / Kursi Putar	1061
21.	Sofa	54
22.	Partisi	4
23.	Tempat Tidur	19

No	Uraian	Jumlah (unit)
24.	CCTV + Kabel RCA	27
25.	Mesin Penghisap Debu / Mesin Pel / Mesin Pemotong Rumput	45
26.	Mesin Cuci / Mesin Pengering Pakaian	6
27.	Lemari Es / Freezer	20
28.	AC / Kipas Angin / Exhaust Fan	150
29.	Water Heater	9
30.	Alat Dapur (Kompur Gas, Tabung Gas, Rice Cooker, Kitchen Set)	9
31.	Dispenser	40
32.	Televisi	41
33.	Sound System / Wireless / Microphone / Stabilisator	42
34.	Kamera Video / Handy Cam / Video Recorder Stationer	11
35.	Videotron	2
36.	Kamera	20
37.	Telephone	7
38.	Faximile	4
39.	Handy Talky (HT)	93
40.	Hand Phone	6
41.	UPS	19
42.	GPS	4
43.	Genset/Perkakas Bengkel Listrik	5
44.	Stabilizer	4
45.	Alat Olahraga / Alat Fitness	69
46.	Lift Stabilizer Straconus	2
47.	Transportable Water Pump & Pompa Air	11
48.	Screening Classifier	1
49.	Gerobak Dorong	2
50.	Sepeda	1
51.	Gergaji	1
52.	Mesin Pengolahan Sampah	1

No	Uraian	Jumlah (unit)
53.	Handsprayer	2
54.	Palang Pintu Otomatis	1
55.	White Board / White Board Elektronik	6
56.	Braket Proyektor / Braket TV / Tripod Kamera	6
57.	Papan Nama / Papan Tulis / Papan Pengumuman	10
58.	Tiang Bendera / Podium / Mimbar	14
59.	Tangga	1
60.	Tempat Sampah	141
61.	Polisher	4
62.	Karpet	1137
63.	Tikar	32
64.	Jam Listrik	4
65.	Self Supporting Tower	3
66.	Infrared Thermometer	7
67.	Alat Pemadam Kebakaran Portable / Selang Semprot	13
68.	Lambang Garuda / Logo Kota Depok	2
69.	Aquarium	6
70.	Gordyin/Kray	9
71.	Wallpaper	17
72.	Kasur / Bantal	26

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Depok

Sarana dan prasarana pada Tabel 2.1 diatas merupakan beberapa jenis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur berada dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Sekretariat Daerah dan beberapa unit diantaranya dalam keadaan rusak dan akan dihapus dalam aset.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilihat dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/ target yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 dan/ atau indikator kinerja kunci/indikator kinerja utama sebagai tolok ukur kinerja pelayanan.

Perangkat Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi staf yang membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, pengkoordinasian, pemantau, evaluasi dan pembinaan administrasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Depok. Sehingga penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tidak dapat diberlakukan pada Organisasi Perangkat Daerah mengingat tidak adanya urusan wajib yang dikelola oleh Perangkat Sekretariat Daerah Kota Depok.

Adapun tabel format pencapaian kinerja pelayanan adalah sebagaimana dimaksud pada Tabel. 2.3.1 dan 2.3.2 berikut.

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010	Tepat / Tidak		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat, 23 Maret 2015	Tepat
2	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	... Urusan		10 urusan	15 urusan	15 urusan	15 urusan	15 urusan	10 urusan	15 urusan wajib yang sudah diterapkan SPMnya			
3	Kerjasama dengan daerah lain	... MOU		15 MoU	15 MoU	15 MoU	15 MoU	15 MoU	38 MoU	5 (lima) MoU	6 (enam) MoU	9 (sembilan) MoU	3 (tiga) MoU
4	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, 26 urusan	100 %, 26 urusan	100 %, 26 urusan	100 %, 26 urusan	100 %, 26 urusan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda Nomor 8 Tahun 2011				
6	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>1</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda Nomor 13 Tahun 2011				
7	Penataan SKPD	---- unit							40 unit	40 unit	39 unit	50 unit	50 unit
8	PERDA yang	.. PERDA		14 Perda	11 Perda	12	13 Perda	14	21 Perda	13 Perda	17 Perda	8 Perda	11 Perda

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	ditetapkan					Perda		Perda					
9	RAPERDA yang disetujui DPRD	.. PERDA		14 Perda	11 Perda	12 Perda	13 Perda	14 Perda	100%, dari 21 Raperda yang diusulkan 21 Perda yang disetujui DPRD	72,22%, dari 18 Raperdaya ng diusulkan 13 Perda yang disetujui DPRD	100%, dari 17 Raperda yang diusulkan 17 Perda yang disetujui DPRD	72,73%, dari 11 Raperda yang diusulkan 8 Perda yang disetujui DPRD	100%, dari 11 Raperda yang diusulkan 11 Perda yang disetujui DPRD
10	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	.... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, (605 SK)	100%, (585 SK)	100%, (534 SK)	100%, (475 SK)	100%, (246 SK)
11	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	.... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, (55 Perwa)	100%, (68 Perwa)	100%, (58 Perwa)	100%, (69 Perwa)	100%, (407 Perwa)
12	Jumlah PERDA yang dibatalkan	.... %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Keberadaan PERDA/Perwal	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda No.02/	Ada, Perda No.02/	Ada, Perda No.02/	Ada, Perda No.02/	Ada, Perda No.02/ 2011

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	tentang konsultasi publik								2011	2011	2011	2011	
14	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik websiteKota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, www.depo k.go.id	Ada, www.depo k.go.id	Ada, www.depo k.go.id	Ada, www.dep ok.go.id	Ada, www.depok. go.id
15	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	Penghar- gaan							Ada, 4 (empat) pengharga an	Ada, 5 (lima) pengharg- an	Ada, 8 (delapan) pengharga- an	Ada, 11 pengharga an	Ada
16	Keberadaan <i>e-procurement</i>	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009
17	Jumlah persetujuan investasi	... ijin		20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	Ada, 24 ijin lokasi	9 ijin investasi	1.179 ijin investasi	1.140 ijin investasi	

Sumber :Lampiran II.1 Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 s.d 2015

**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Indikator Program, Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2016**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah urusan yang sudah menerapkan SPM		SPM	5 SPM	3 SPM	3 SPM	3 SPM	3 SPM	7 SPM	5 SPM	15 SPM	15 SPM	15 SPM
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan pemkot (revisi SOTK)		OPD	3 OPD	7 OPD	7 OPD	5 OPD	5 OPD	8 OPD	11 OPD	11 OPD	10 OPD	5 OPD
3	Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD		Raperda	14 Raperda	11 Raperda	12 Raperda	13 Raperda	14 Raperda	21 Perda	20 Perda	17 Perda	11 Perda	11 Perda
4	Jumlah regulasi lain yang dihasilkan		produk hukum	300 produk hokum	300 produk hukum	450 produk hukum	450 produk hukum	450 produk hukum	780 produk hukum	813 produk hukum	1076 produk hukum	888 produk hukum	407 produk hukum
5	Berkurangnya		%	70% (5	70% (5	70% (5	70% (5	70% (5	11 perkara	3 perkara	14 perkara	11 perkara	13 perkara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	masalahHukum		(perkara)	perkara)	perkara)	perkara)	perkara)	perkara)					
6	Cakupan layanan LPSE		%	75%	100%	100%	100%	100%	100% (434 paket)	100% (300 paket)	100% (400 paket)	100% (600 paket)	100% (674 paket)
7	Sertifikasi ahli pengadaan barangdan jasa		orang	200 orang	200 orang	150 orang	150 orang	100 orang	300 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
8	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan		unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	1 unit
9	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan		kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	9 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
10	Meningkatnya peran DKM		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
11	Jumlah kerjasama dengan daerah lain		MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	-	3 MoU	2 MoU	3 MoU	3 MoU

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi		MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	2 MoU	8 MoU	3 MoU	13 MoU	8 MoU
13	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha		MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	-	-	4 MoU	-	-
14	Jumlah kerjasama dengan para pihak		MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	-	3 MoU	-	1 MoU	5 MoU
15	Tingkat kinerja kecamatan		%	70%	80%	85%	85%	85%	68%	68%	80%	80%	85%
16	Tingkat kinerja kelurahan		Paket buku adm	-	74 paket buku adm	-	74 paket buku adm	-	-	74 paket buku adm	-	Dilaksanakan-an BPMK	-
17	Frekuensi kegiatan (kunker, koordinasi, keprotokolan, dokumentasi)		... %	80%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
18	Akomodasi (rumah dinas, jamkes, pakaian dinas, dll)		... %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah kebijakan ekonomi		... dokumen kebijakan	4 dok kebijaka n	4 dok kebijaka n	4 dok kebijaka n	4 dok kebijaka n	4 dok kebijaka n	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	-	4 dok kebijakan	7 dok kebijakan
20	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi		... dokumen rekomen dasi	2 dok rekomen dasi	2 dok rekomen dasi	2 dok rekome ndasi	2 dok rekome ndasi	2 dok rekome ndasi	2 dok rekomend asi	2 dok rekomend asi	2 dok rekomend asi	2 dok rekomend asi	2 dok rekomendasi
21	Tersusunnya LAKIP Kota		... dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
22	Tersusunnya LPPD dan ILPPD		... dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
23	Tersedianya standar harga belanja daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
24	Tersedianya standar analisa belanja daerah		1 dokumen	-	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
25	Luas lahan bersertifikat		Ha										
26	Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan		%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
27	Jumlah ijin lokasi (ijin lokasi/tahun)		.... Ijin lokasi	20	20	20	20	20	11	-	20	-	20

Adapun realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud terdapat pada Tabel.

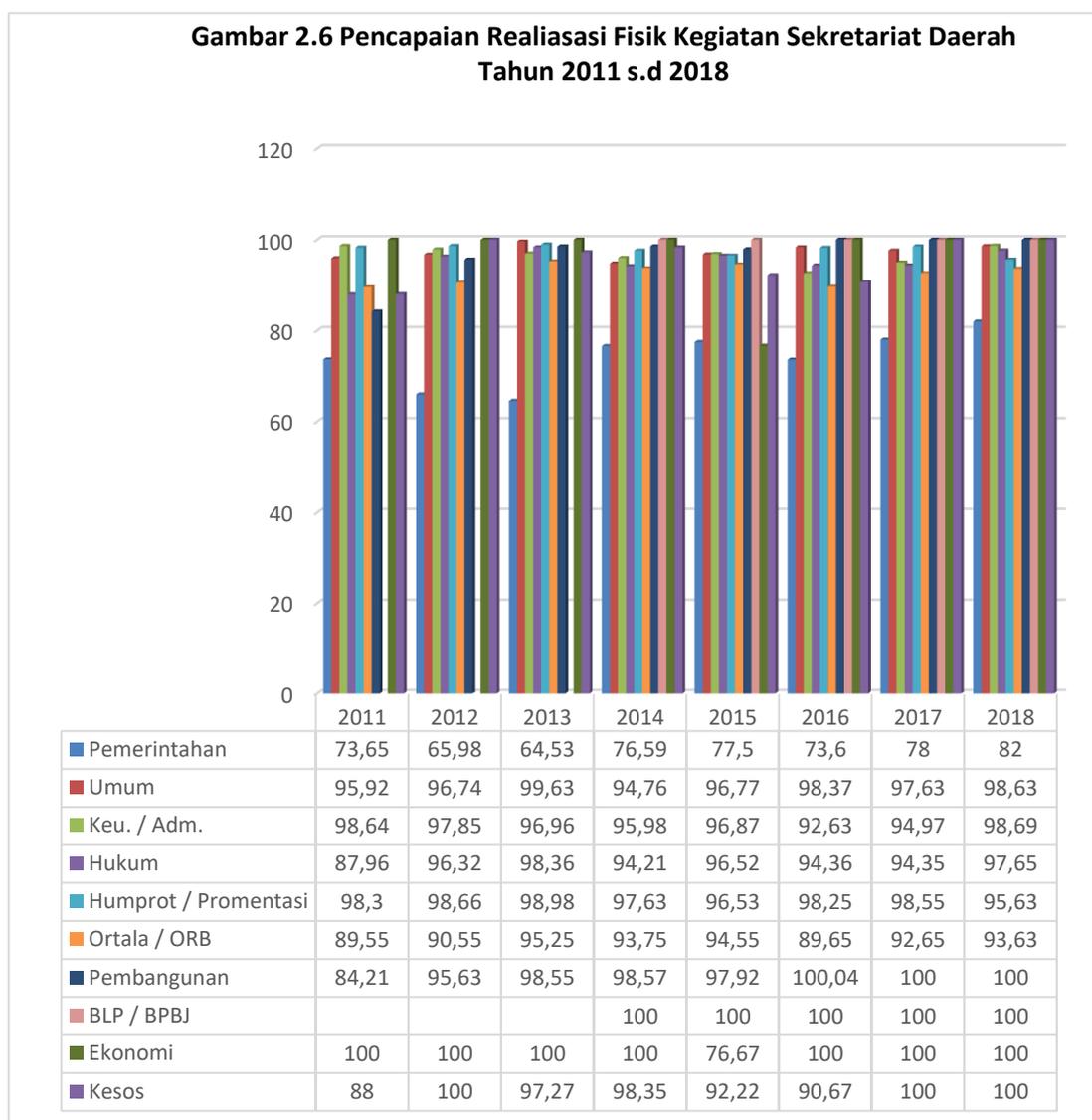
2.3.3.

**Tabel 2.3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>67,690,868,59</b> 4	<b>109,903,200,7</b> 44	<b>148,253,074,7</b> 48	<b>132,562,334,3</b> 40	<b>258,426,103,</b> 635	<b>54,325,827,6</b> 15	<b>47,667,943,0</b> 67	<b>56,973,347,</b> 286	<b>83,804,642,2</b> 96	<b>116,048,112,3</b> 58	<b>80.26</b>	<b>43.37</b>	<b>38.43</b>	<b>63.22</b>	<b>44,91</b>	<b>38,147,047,008</b>	<b>12,344,456,9</b> 49
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>11,985,506,34</i> 4	<i>16,556,562,4</i> 94	<i>14,401,961,8</i> 98	<i>19,036,470,2</i> 74	<i>22,246,236</i> ,235	<i>10,975,141,2</i> 08	<i>12,147,105,12</i> 7	<i>12,919,214,</i> 235	<i>15,716,971,8</i> 84	<i>19,938,710,30</i> 5	<i>91.57</i>	<i>73.37</i>	<i>89.70</i>	<i>82.56</i>	<i>89,63</i>	<i>2,052,145,978</i>	<i>1,792,713,81</i> 9
- Belanja pegawai	11,985,506,34 4	16,556,562,4 94	14,401,961,8 98	19,036,470,2 74	22,246,236 ,235	10,975,141,2 08	12,147,105,12 7	12,919,214, 235	15,716,971,8 84	19,938,710,30 5	91.57	73.37	89.70	82.56	89,63	2,052,145,978	1,792,713,81 9
<i>Belanja Langsung</i>	<i>55,705,362,250</i>	<i>93,346,638,2</i> 50	<i>133,851,112,8</i> 50	<i>113,525,864,0</i> 66	<i>236,179,867,</i> 400	<i>43,350,686,4</i> 07	<i>35,520,837,94</i> 0	<i>44,054,133,</i> 051	<i>68,087,670,4</i> 12	<i>96,109,402,05</i> 3	<i>77.82</i>	<i>38.05</i>	<i>32.91</i>	<i>59.98</i>	<i>40,69</i>	<i>36,094,901,030</i>	<i>10,551,743,1</i> 29
- Belanja Pegawai	4,282,734,000	3,637,551,0 00	3,182,429,0 00	3,111,988,0 00	4,155,797 ,000	3,299,929,0 00	2,240,073,00 0	2,602,250, 750	2,535,398,0 00	3,499,210,000	77.05	61.58	81.77	81.47	84,20	(25,387,400)	39,856,200
- Belanja Barang Dan Jasa	34,245,644,85 0	32,363,305,2 50	32,631,694,1 50	44,760,333,6 66	52,674,544 ,900	25,681,089,2 55	26,235,826,3 40	26,528,328, 729	36,777,906,3 80	41,386,516,35 8	74.99	81.07	81.30	82.17	78,57	3,685,780,010	3,141,085,42 1
- Belanja Modal	17,176,983,40 0	57,345,782,0 00	98,036,989,7 00	65,653,542,4 00	179,349,52 5,500	14,369,668,1 52	7,044,938,60 0	14,923,553, 572	28,774,366,0 32	51,223,675,69 5	83.66	12.29	15.22	43.83	28,56	32,434,508,420	7,370,801,50 9

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2011 s.d 2015

Untuk melengkapi indikator kinerja kunci dan indikator capaian program pada Tabel 2.3.2 serta pencapaian dari sisi anggaran pada Tabel. 2.3.3 diatas, pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 akan ditampilkan pencapaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bagian dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2018 yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

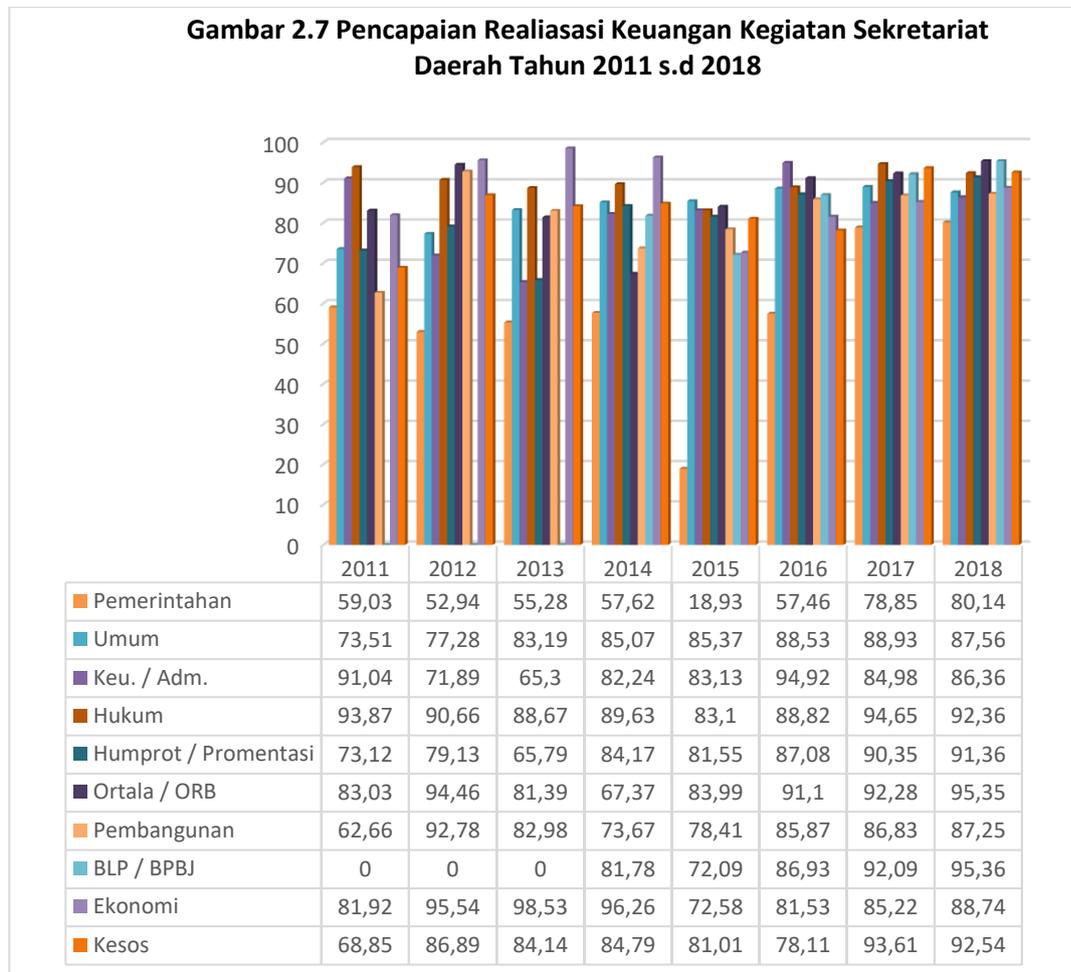


Sumber : SIEP 2011-2018, data diolah

Pada Gambar 2.6 diatas dapat dilihat, tren penyerapan anggaran kegiatan per bagian selama kurun waktu 2011 s.d 2018 untuk bagian Pemerintahan relatif rendah, hal ini disumbang penyerapan pengadaan tanah yang relatif rendah

setiap tahunnya yang antara lain disebabkan karena belum rampungnya kelengkapan administratif, belum mufakatnya Pemerintah Daerah dan para Pemilik lahan yang akan dibebaskan, adanya kebijakan pimpinan terkait pengadaan lahan yang belum dapat dieksekusi serta belum adanya MoU dengan BPN dalam pensertifikatan aset/lahan. Sedangkan untuk bagian lain, rendahnya penyerapan antara lain disebabkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dan kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya aturan dari kebijakan Pemerintah Pusat yang belum ada/payung hukum belum jelas.

**Gambar 2.7 Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2011 s.d 2018**



Sumber : SIEP 2011-2018, data diolah

Dari Gambar 2.7, maka dapat dilihat rata-rata capaian keuangan terendah pada Bagian Pemerintahan yang melaksanakan pengadaan tanah/lahan yang pada kurun waktu tahun tersebut sebagian besar tidak terealisasi atau realisasinya rendah. Sedangkan untuk bagian layanan pengadaan baru terbentuk/beroperasi pada Tahun 2014 setelah sebelumnya berada *ad hoc* dibawah Bagian Pembangunan.

Berdasarkan tabel diatas maka capaian kegiatan penting yang telah dihasilkan oleh masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dipandang dari berbagai aspek melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2019 itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

Selama kurun waktu 2011-2019, kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang telah dilaksanakan Bagian Protokol dan Dokumentasi dalam antara lain :

- a. Peliputan kegiatan/kunjungan kerja KDH/WKDH;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Publik yaitu :*Talk show* dan Pameran Foto/Video Depok Tempo Dulu dan Sosialisasi Kebijakan Publik dalam rangka Jambore Kota Layak Anak;
- c. Sosialisasi Kebijakan Publik/Program Pemerintah melalui media cetak dan elektronik : 1) pemuatan advertorial pada media massa mingguan dan harian baik media lokal maupun nasional;2) leaflet, brosur dan sticker; konferensi pers dengan awak media;3)

- media elektronik diantaranya melalui website Pemerintah Kota Depok yaitu : [humas.depok.go.id](http://humas.depok.go.id) dan jejaring sosial (*twitter*)@*humas\_depok* serta *Facebook* : *humasdepok*;
- d. Dalam hal keprotokolan, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti, pendampingan kedinasan KDH/WKDH baik itu kunjungan kerja/inspeksi serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
  - e. Memfasilitasi penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional yang dirangkai dengan Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap bulan;
  - f. Pembuatan Buku Saku Dokumentasi;
  - g. Pembuatan CD selayang pandang Kota Depok dalam 5 (lima) tahun sekali;
  - h. Memfasilitasi perangkat komputer dan modem untuk membuat dan mengirim berita bagi awak media pada media center.

Selain pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, Bagian Humas dan Protokol juga bertindak sebagai PPID pada Sekretariat Daerah Kota Depok.

## 2. Aspek Administrasi Umum dan Keuangan

Dari aspek ini, telah dilakukan beberapa kegiatan administrasi umum dan keuangan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur serta dalam rangka menciptakan tertib

administrasi/pengelolaan keuangan dan umum, yang antara antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal administrasi/pengelolaan keuangan, beberapa kegiatan yang didanai dari APBD Kota maupun rutinitas/tupoksi yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan antara lain : pelaksanaan bimtek pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan lingkup Setda untuk *upgrade* informasi dan pengetahuan para pengelola keuangan kegiatan lingkup Setda; penyusunan dokumen perencanaan (Renja dan RKT baik murni dan Perubahan) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Setda dan KDH/WKDH yang dimulai dari proses Forum Renja OPD Setda dansinkronisasi program dan kegiatan; sinkronisasi neraca/aset Setda; pengadministrasian, pelaksanaan proses penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan Setda dan KDH/WKDH; penyusunan LAKIP Setda; pengkoordinasian RFK/SIEP dan LKPJ Setda; melaksanakan tindak lanjut/LHP Inspektorat Daerah dan membantu tindak lanjut/LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. Dalam hal administrasi umum, beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum selain memfasilitasi internal Setda, KDH/WKDH serta seluruh OPD dilingkup Balaikota Depok maupun seluruh OPD/PNS Kota Depok, yaitu :
  - Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan seluruh OPD/PNS Aparatur seperti :

Pengadaan Sarana Mobilitas (Operasional OPD, DPRD, KDH/WKDH), Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya (seluruh OPD) serta sebagian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Setda, Kecamatan, Kelurahan);

- Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan OPD lingkup Balaikota seperti : penyediaan jasa sumberdaya listik, air dan telepon (Gedung Setda, Dibaleka I, Dibaleka II, Gedung Perpustakaan, Gudang Obat, Gedung Pelayanan PBB, Gedung BLP, Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Mesjid dan Gedung Parkir, Stadion dan Balai Rakyat); Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (172 orang petugas); Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Gedung kantor (Gedung KPU);
- Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dinas KDH/WKDH, antara lain : Penyediaan Rumah Dinas; Penyediaan Logistik; Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas; Penyediaan Pakaian Dinas; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Rumah

Dinas dan Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Konsultasi;

- Adapun pelayanan khusus untuk internal Sekretariat Daerah, berupa kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan, Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Bermotor, Pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga yang dilaksanakan s.d TA 2014;
- Disamping itu pula, mulai Tahun 2014 penerimaan kunjungan kerja dari Pemerintah Pusat/Daerah difasilitasi oleh Bagian Umum dibantu dengan Bagian Protokol dan Dokumentasi.

### 3. Aspek Sosial Keagamaan

Langkah-langkah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan keagamaan masih terus diupayakan melalui perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan masyarakat dan sosial keagamaan maupun yang hanya bersifat pengkoordinasian kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan rakyat.

Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan bagi masyarakat antara lain : fasilitasi pelaksanaan

MTQ/STQ Tingkat Kota dan Provinsi Jawa Barat, fasilitasi Ramadhan, pendampingan dalam pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Depok dan sarasehan dakwah. Selain dalam pelayanan keagamaan secara umum kepada masyarakat, terdapat pula kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan mental keagamaan aparatur seperti : pembinaan baca al-quran untuk pemberantasan buta aksara al-quran dan bimbingan rohani bagi aparatur.

Disamping kegiatan-kegiatan keagamaan, terdapat pula beberapa kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat antara lain : pengelolaan ZIS dan Wakaf, peningkatan kapasitas DKM berupa pelatihan bagi pengurus DKM hingga kepada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan/sarana ibadah yang pengelolaan keuangannya dari hibah.

#### 4. Aspek Pembangunan

Dalam aspek pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan, bina administrasi pembangunan, bina pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah : penyusunan standar satuan harga barang dan jasa belanja Pemerintah Kota Depok yang terdiri dari Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas dan Personalia yang digunakan oleh seluruh OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, serta penyusunan standar analisa belanja yang dilaksanakan sejak Tahun 2013.

Selain itu dilaksanakan pula evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota Depok yang antara lain mengevaluasi laporan RFK/SIEP per triwulan, monitoring dan evaluasi DAK, tugas pembantuan, bantuan Gubernur, belanja tidak terduga/dana bagi hasil/bantuan keuangan dan lain sebagainya).

Sejak tahun 2009 pelelangan telah dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) sedangkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa telah diselenggarakan sejak Tahun 2006 dengan jumlah peserta bimtek selama kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 adalah berjumlah 900 orang, sesuai dengan target RPJMD 2011-2016 sedangkan jumlah peserta bimtek selama kurun waktu Tahun 2016 s.d 2018 adalah 149 orang. Mulai Tahun 2016, sertifikasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Peraturan Kepala LKPP RI No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia LKPP RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan lain terkait pengendalian dan perencanaan pembangunan seperti : fasilitasi program percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan,

fasilitasi tim arboretum, penyediaan informasi dan sosialisasi pengendalian ruang terbuka hijau, pembangunan sistem terpadu administrasi pembangunan dan peningkatan kapasitas serta sinergitas TAPD yang dilaksanakan setiap tahun.

#### 5. Aspek Pemerintahan dan Kerjasama

Merupakan salah satu aspek yang cukup kompleks selain karena memegang 2 (dua) urusan juga tugas pokok yang meliputi pemerintahan umum, pertanahan serta kerjasama dan otonomi daerah. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kecamatan serta teknis pengadaan lahan berada pada kewenangan ini.

Selain satu-satunya bagian lingkup Sekretariat Daerah yang mengurus 2 (dua) urusan, Bagian Pemerintahan juga mempunyai anggaran dan program yang dilaksanakan cukup beragam, setidaknya terdapat 6 (enam) program yaitu :

- a) Program Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah; mengurus/mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah(LPPD) dan ILPPD, fasilitasi desk pemilukada/pilgub dan penyusunan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Kota Depok;
- b) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan antara lain memfasilitasi tim koordinasi kerjasama antar daerah dalam

penyusunan *MoU* Kota Depok sebelum akhirnya disinkronkan dengan OPD terkait dan diharmonisasikan di Bagian Hukum Setda; memfasilitasi pelaksanaan APEKSI, penegasan batas wilayah dan Koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kota;

- c) Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dengan peningkatan kapasitas kecamatan hasil pemekaran, pembinaan kecamatan se-Kota Depok, peningkatan kinerja dan evaluasi kinerja kecamatan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan administrasi kelurahan serta Penyusunan Naskah Akademik Perda Pemekaran Wilayah di Kota Depok;
- d) Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan dengan kegiatan inventarisasi pembakuan nama rupa bumi baik unsur alami dan buatan yang proses penyusunannya masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2019;
- e) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan pembinaan administrasi pertanahan dan bimbingan teknis penyusunan LPPD untuk meningkatkan kemampuan OPD dalam penyusunan dan pengumpulan data LPPD;
- f) Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan dengan kegiatan antara lain : Pensertifikatan tanah masyarakat kurang mampu, monitoring dan evaluasi izin lokasi, pendataan lahan

bersertifikat, serta pengadaan tanah/pembebasan lahan (terminal Jatijajar-Jalan Raya Bogor, pengelolaan persampahan, gedung pemerintahan, peluasan gedung balaikota, Tempat Pembuangan Akhir dan RTH).

Adapun kerjasama Pemerintah Kota Depok yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintah dan Kerjasama yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2019 dapat dirinci pada Tabel 2.3.5 berikut ini.

**Tabel.2.3.5**  
**Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan Para Pihak Tahun 2011 s.d 2019**

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
2011	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Universitas Gunadarma	Kerjasama bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat
		2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama dibidang Pendidikan penelitian dan konsultasi bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Depok
2012	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan UMKM serta ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan UMKM serta ketahanan pangan

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Universitas Jember	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian/kajian, pengembangan dan pember-dayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka ketahanan pangan
		2. Universitas Ibnu Khaldun	Pengembangan SDM, teknologi tepat guna dan pembangunan ekonomi sektor informal dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berkelanjutan dan menjadikan Kota Depok sebagai Kota Sehat
		3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		4. Universitas Padjajaran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		5. Universitas Negeri Jakarta	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		6. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		7. Institut Pertanian Bogor (Fakultas Teknologi Pertanian)	Kerjasama pengembangan beras ODNR untuk mendukung kegiatan <i>One Day No Rice</i>
		8. BPPT	Pengusaha sistem inovasi daerah, pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri, bioteknologi
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan-an dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		2. Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI)	Kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan audit teknologi di wilayah Kota Depok
		3. Pusat Penelitian Geoteknologi (LIPI)	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian/ kajian penerapan sumur imbuhan dalam rangka konservasi air tanah dan mengatasi banjir
2013	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Selayar	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ketahanan pangan
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		2. Institut Teknologi Bandung	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		3. Akademi Kebidanan Citama	Kerjasama dalam praktik klinik kebidanan
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. PT. Bank Tabungan Negara Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
		2. PT. Pos Indonesia Tbk	Penggunaan layanan Pos untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. PT Bank Negara Indonesia Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
		4. PT. Bank CIMB Niaga Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
2014	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Jombang	Kerjasama dalam ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kota Surabaya	Kerjasama jaringan lintas perkotaan
		3. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Akademi Kebidanan Yaspem Tugu Ibu	Kerjasama dalam praktik kebidanan
		2. Stikes Bakti Pertiwi	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		3. Akademi Kebidanan Tiara Bunda Depok	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		4. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		5. Akademi Kebidanan Pelita Ilmu	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan
		6. Universitas Indonesia	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		7. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan
		8. Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		9. Universitas Gunadarma Jakarta	Kerjasama dalam bidang pengembangan dan penerap-an, tata kelola pemerintah daerah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi Kota Depok
		10. Universitas Negeri Jakarta	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		11. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		12. Universitas Padjajaran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		13. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jakarta	Kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama dukungan atas pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2015	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
		2. Pemerintah Kota Padang	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. Pemerintah Kota Pekanbaru	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju	Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa STIKIM
		2. Politeknik Negeri Jakarta	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat serta Program Pengembangan dan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Depok
		3. Institut Sains dan Teknologi Nasional	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Depok
		4. Akademi Keperawatan Raflesia	Kerjasama Praktik Klinik Keperawatan
		5. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jakarta	Praktik Klinik Kesehatan dan Penelitian Mahasiswa
		6. Akademi Kebidanan Tiara Bunda Depok	Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok
		7. Universitas Indonesia	Peningkatan SDM, Pengembangan sistem dan teknologi informasi, Pembinaan UMK, Program Kerjasama Internasional
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. CIMB Niaga	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		2. Bank Negara Indonesia	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
		3. Bank Tabungan Negara	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
		4. OCBC	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
		5. PT. Pos Indonesia	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		2. Pengadilan Agama Depok	Kerjasama dalam Pelayanan Sidang Isbath Nikah terhadap Warga Kota Depok yang Tidak Mampu
		3. Kementrian Agama Kanwil Depok	Kerjasama dalam Pelayanan Pencatatan Nikah Berdasarkan Isbath Nikah
		4. Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika	Kerjasama Penyediaan Layanan Panggilan Tunggal Darurat di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		5. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama Dukungan atas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kota Depok
2016	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama dalam pelayanan publik
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju	Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok
		2. Politeknik Negeri Jakarta	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		3. Institut Pertanian Bogor	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		4. Akademi Kebidanan Citama	Kerjasama dalam praktik klinik kebidanan
		5. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		6. Universitas Indonesia	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. Bank Negara Indonesia	
		2. Bank Rakyat Indonesia	
		3. Pos Indonesia	
Kerjasama	1. Kementerian		

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
	dengan Para Pihak	Kesehatan Jakarta 1	
		2. Kementrian Agama Kota Depok	
		3. Kementrian Kesehatan RI	
		4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa	
		5. Badan Narkotika Nasional Kota Depok	
2017	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Kanreg III (Bandung) BKN	Implementasi Pemutakhiran data, kenaikan pangkat dan Pensiun
		2. BPKP Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Depok
		3. Lembaga Administrasi Negara	Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Depok melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara
		4. BPJS Kesehatan	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dan Kesehatan Kota Depok 2. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
		5. Kepolisian Resort Kota Depok	Pengamanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Depok
		6. USAID, Bappenas	Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Depok
		7. Kepolisian Daerah Metrojaya	Pelaksanaan rekrutmen aktif terhadap calon peserta penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		8. Ditjen Perbendaharaan KemenKeu Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat	Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
		9. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	1. Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kota Depok 2. Pelaksanaan Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Politeknik Kesehatan Jakarta I	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
		2. Akademi Kebidananan Yaspem Tugu Ibu	Bidang Pendidikan dan Kesehatan
		3. Universitas Gunadarma Jakarta	Pengembangan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Kota Depok
		4. Akademi Kebidanan Citama	Praktik Klinik Kebidanan
		5. Politeknik Negeri Jakarta	Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta program Pengembangan Pebangunan Daerah yang berwawasan Lingkungan di Kota Depok
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. Perumahan Grand Depok City	Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan Grand Depok City terletak di kelurahan Depok kecamatan pancoranmas, kelurahan Tirta jaya dan Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		2. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Depok	Fasilitas Kartu Identitas Anak dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak di Kota Depok terkait pemberian fasilitas/keringanan kepada anak yang memiliki Kartu Identitas Anak
		3. dengan PT Delta Jaya Eduka	Fasilitas Kartu Identitas Anak dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak di Kota Depok terkait pemberian fasilitas/keringanan kepada anak yang memiliki Kartu Identitas Anak
		4. Kolam Renang Tirta Ria Beji	Fasilitas Kartu Identitas Anak dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak di Kota Depok terkait pemberian fasilitas/keringanan kepada anak yang memiliki Kartu Identitas Anak
		5. Depok Fantasy Water park	Fasilitas Kartu Identitas Anak dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak di Kota Depok terkait pemberian fasilitas/keringanan kepada anak yang memiliki Kartu Identitas Anak
		6. PT Hero	Pelaksanaan Program Penyediaan Kios 1000 kios/los
		7. PT Alfa Retailindo	Pelaksanaan Program Penyediaan Kios 1000 kios/los
		8. PT Lion Superindo	Pelaksanaan Program Penyediaan Kios 1000 kios/los
		9. PT Gapura Omega Alpha Land	Pelaksanaan Program Penyediaan Kios 1000 kios/los
		10. Trans Retail Indonesia	Pelaksanaan Program Penyediaan Kios 1000 kios/los

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
2018	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi dan Perhubungan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Investasi, Perindustrian, , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Penataan Ruang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 2. Nota Pemberian Bantuan Keuangan
		2. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Kerjasama Antar Daerah Perbatasan dalam Pelayanan
		3. Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Kerjasama Antar Daerah Perbatasan dalam Pelayanan
		4. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Kementerian PPPA Republik Indonesia	Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kota Depok
		2. Majelis Ulama Indonesia Kota Depok	Pembinaan Umat Islam Menuju Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius
		3. Ombudsman Republik Indonesia	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan Revitalisasi Situ Pedongkelan dan Situ-Situ di Kawasan Universitas Indonesia Depok</li> <li>2. Pengintegrasian Penerangan Persampahan Kota Tangerang Selatan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo</li> <li>3. Penyelenggaraan Program Jabar Masagi</li> <li>4. Penyelenggaraan Perpustakaan</li> <li>5. Penanggulangan HIV/AIDS Secara Terpadu melalui Gerakan Pencegahan Ancaman Radikalisme, Narkoba, HIV/AIDS dan Kekerasan untuk mewujudkan Jawa barat Juara Lahir Batin</li> </ol>
		5. Direktorat Jen. Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI	Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Terletak di Stasiun Depok Baru
		6. Badan Pusat Statistik Kota Depok	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Kota Depok
		7. PDAM Tirta Kahuripan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Berita Acara Serah Terima Aset dan Pegawai PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
		8. Kejaksaan Negeri Kota Depok	Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		9. BNN Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
		10. Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur	1. Bidang Kelola Lingkungan Hidup 2. Bidang Ketahanan Pangan
		11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Insitut Pertanian Bogor	1. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan, Masyarakat dan Ketahanan Pangan 2. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri
		2. Politeknik Kesehatan Kementerian Jakarta III	Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa
		3. Universitas Indonesia	1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah
		4. Universitas Respati Indonesia	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		5. Institut Teknologi Bandung (ITB)	Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Teknologi dan Seni
		6. Universitas Padjajaran (UNPAD)	Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah
		7. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah
2019	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan
		2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1. Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 2. Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Besar, Situ Sawangan/Bojongsari dan Situ Pladen 3. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	Bidang Perizinan, Promosi dan Investasi
		4. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Bidang Lingkungan Hidup Kualitas Udara Bersih di Kawasan Jabodetabekjur 2. Bidang Ketahanan Pangan 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
			Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. PT. Bank Syariah Mandiri	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah
		2. PT. Matahari Departemen Store Tbk	Pelaksanaan Program Penyediaan 1000 Kios/Los
		3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah Kota Depok
		4. PT. PP Properti, Tbk	Fasilitasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/corporate social responsibility di Kota Depok
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Universitas Jayabaya	Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok
		2. Universitas Esa Unggul dan Pemerintah Kota Depok	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
		3. Universitas Nasional	Bidang Pendidikan dan Kesehatan
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Depok
		2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat	Persertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Depok

Sumber : Bag.Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2019

Jika kita lihat dari Tabel 2.3.5 diatas, maka terlihat terdapat peningkatan jumlah kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok setiap tahunnya. Untuk melihat perkembangan dan jumlah kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan Para Pihak sesuai dengan Capaian RPJMD 2011-2016 berikut ditampilkan dalam Tabel. 2.3.6 berikut ini.

**Tabel.2.3.6**  
**Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Depok menurut**  
**Capaian Program RPJMD 2011 s.d 2018**

No.	Uraian	MoU															
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Jumlah Kerjasama dengan Daerah Lain	10	-	10	3	10	2	10	3	10	3	10	1	10	-	10	1
2.	Jumlah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	3	2	3	8	3	3	3	13	3	8	3	6	3	5	3	7
3.	Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha	1	-	1	-	1	4	1	-	1	5	1	3	1	10	1	-
4.	Jumlah Kerjasama dengan Para Pihak	1	-	1	3	1		1	1	1	5	1	5	1	9	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Sumber : Data Diolah, Tahun 2019

Keterangan : T = Target, R = Realisasi

Jika dilihat dari Tabel. 2.3.6 secara kuantitas total antara target dan realisasi tercapai, namun jika dibandingkan antara kuantitas target per kategori *MoU*, maka masih terdapat ketidaksesuaian. Oleh karenanya indikator program akan direvisi dengan membuat umumnya jumlah *MoU* yang dihasilkan Pemerintah Daerah. Sedangkan dari sisi kualitas *MoU* yang dihasilkan pada Tahun 2016 mulai diinisiasi bimtek penyusunan *MoU* bagi aparatur OPD sehingga *MoU* yang dihasilkan bisa terstandarisasi pula. Selain itu perlunya pelaksanaan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan oleh OPD baik dari segi ruang lingkup yang masih relevan maupun keefektifan kerjasama itu sendiri.

#### 6. Aspek Organisasi Kelembagaan dan Tatalaksana

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur serta pengkoordinasian perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perangkat daerah, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspek dimaksud yaitu pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan, pelaksanaan evaluasi kelembagaan, pembentukan organisasi perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setelah Tahun 2013 diserahkan kepada OPD masing-masing. Untuk evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana disamping evaluasi analisa jabatan, evaluasi kinerja pelayanan publik, evaluasi kinerja kelembagaan dan penilaian prestasi kerja. Selain mengevaluasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana juga melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan/ketatalaksanaan yang dibutuhkan perangkat daerah yaitu antara lain : penyusunan tata naskah dinas, standar pelayanan publik, rincian tugas fungsi dan tata kerja OPD, analisa beban kerja/jabatan, tata hubungan jabatan hingga kepada penyusunan remunerasi dan sosialisasi pengendalian gratifikasi.

Rincian evaluasi penerapan SPM dalam kurun waktu 2011 s.d 2016 yang merupakan capaian RPJMD dari kegiatan kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011, dengan 7 (tujuh) SPM yaitu : Komunikasi dan Informasi; Kesenian; Lingkungan Hidup; Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Pemerintahan Dalam Negeri; Pendidikan Dasar dan Ketenagakerjaan.

2. Tahun 2012, dengan 5 (lima) SPM yaitu : Ketahanan Pangan; Penanaman Modal; Perumahan Rakyat; Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Tahun 2013 s.d 2016 terdapat 15 SPM yang merupakan urusan wajib, yaitu : Komunikasi dan Informasi; Kesenian; Lingkungan Hidup; Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Pemerintahan Dalam Negeri; Pendidikan Dasar; Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Penanaman Modal; Perumahan Rakyat; Perhubungan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kesehatan; Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana dan Sosial.

Pada Tahun 2017 dievaluasi 6 (enam) SPM sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Pelayanan Dasar. Sampai dengan Tahun 2018 masih mengevaluasi 15 SPM yang dikirim untuk dievaluasi ke Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai laporan

Adapun untuk Pencapaian Kinerja Kelembagaan berupa Revisi SOTK yang dapat berupa : Perubahan Struktur, Perubahan Tupoksi dan Uraian Tupoksi. Rekapitulasi Revisi SOTK 2011 s.d 2018 dapat dilihat pada Tabel.2.7 berikut.

**Tabel. 2.3.7**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelembagaan (Revisi SOTK)**  
**Tahun 2011 s.d 2019**

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
1.	2011	1. Perubahan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Perubahan Struktur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		3. Perubahan Struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4. Perubahan Struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Perubahan Tupoksi Dinas Koperasi UMKM dan Pasar
		6. Perubahan Tupoksi Sekretariat Daerah
		7. Pembentukan Sekretariat Dewan Pembina KORPRI
		8. Pembentukan UPT Pemadam Kebakaran Bojongsari
2.	2012	1. Perubahan Tupoksi Sekretariat Daerah
		2. Perubahan Tupoksi UPT IPLT Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		3. Perubahan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		4. Perubahan Struktur Badan Kepegawaian Daerah
		5. Perubahan Struktur Badan Lingkungan Hidup
		6. Perubahan Struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		7. Perubahan Struktur Inspektorat Daerah
		8. Perubahan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja
		9. Perubahan Struktur Sekretariat Dewan
		10. Perubahan Struktur Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		11. Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
3.	2013	1. Perubahan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Penyusunan Tupoksi Bagian Layanan Pengadaan
		3. Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
		4. Penyusunan Uraian Tugas Kecamatan
		5. Penyusunan Uraian Tugas Kelurahan
		6. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Cimanggis
		7. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Tapos
		8. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Cipayung
		9. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Pancoran Mas
		10. Perubahan Struktur Sekretariat Daerah
		11. Pembentukan UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cipayung
4.	2014	1. Penyusunan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Penyusunan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
		3. Penyusunan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
		4. Penyusunan Uraian Tugas Inspektorat Daerah
		5. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Pendidikan
		6. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Bina Marga Sumberdaya Air
		7. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		8. Penyusunan Uraian Tugas Staf Ahli
		9. Pembentukan UPT Pasar Sukatani
		10. Penghapusan UPT Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka
5.	2015	1. Perubahan Tupoksi Sekretariat Dewan
		2. Perubahan Tupoksi Dinas Perhubungan

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
		3. Perubahan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4. Perubahan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
		5. Perubahan Tupoksi Dinas Kesehatan
6.	2016	1. Perubahan Tupoksi Dinas Pendidikan
		2. Perubahan Tupoksi Dinas Kesehatan
		3. Perubahan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4. Perubahan Tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman
		5. Perubahan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		6. Pembentukan Dinas Sosial
		7. Perubahan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja
		8. Perubahan Tupoksi Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
		9. Perubahan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		10. Perubahan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		11. Perubahan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12. Perubahan Tupoksi Dinas Perhubungan
		13. Perubahan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika
		14. Perubahan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15. Perubahan Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		16. Perubahan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
		17. Perubahan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		18. Perubahan Tupoksi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		19. Perubahan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja
		20. Perubahan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		21. Perubahan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
		22. Perubahan Tupoksi Badan Keuangan Daerah
		23. Perubahan Tupoksi Sekretariat Daerah
		24. Perubahan Tupoksi Sekretariat DPRD
		25. Perubahan Tupoksi Inspektorat Daerah
		26. Perubahan Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		27. Perubahan Tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah
		28. Perubahan Tupoksi Kecamatan
		29. Pembentukan UPTD Perbekalan Farmasi
		30. Pembentukan UPTD Meteorologi
		31. Pembentukan UPTD LPSE
		32. Pembentukan UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I
		33. Pembentukan UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II
		34. Pembentukan UPTD J alan dan Drainase Wilayah III
		35. Pembentukan UPTB Penelitian dan Pengembangan
7.	2017	36. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
		37. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
		38. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan
8.	2018	39. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah
		40. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan
		41. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
		42. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial
		45. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.	2019	46. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah
		47. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		48. Pembentukan Taman Kanak – Kanak Negeri
		49. Pembentukan UPTD Taman Hutan Raya Kota Kelas A
		50. Pembentukan UPTD LAPKESDA Kelas A
		51. Pembentukan UPTD Puskesmas
		52. Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda
		Perubahan Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja DPAPMK
		53. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli

Sumber : Bag. Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan

secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan itu telah dilakukan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab) dengan mengevaluasi hasil analisis jabatan berupa *job grading* (kelas/bobot jabatan) dalam bentuk *scoring* sehingga terlihat tingkat kesesuaian antara jabatan yang dipangku dengan pemangku jabatan yang ada dengan tujuan untuk :

- 1) Penataan pegawai (rotasi dan mutasi),
- 2) Rekomendasi pendidikan dan pelatihan, dan
- 3) Kesejahteraan.

Perbedaan diantara keduanya, bahwa Analisis Beban Kerja (ABK) lebih kepada kuantitas SDM yang dibutuhkan sedangkan Analisa Jabatan (Anjab) lebih kepada kualitas SDM yang dibutuhkan, kesesuaian/kompetensi baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) maupun Jabatan Struktural. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan ABK dan Anjab untuk Jabatan Struktural, sedangkan untuk Tahun 2015 untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan ditahun 2016-2017 untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

#### 7. Aspek Perekonomian

Jika dilihat dari ketercapaian indikator/capaian program yang dilaksanakan Bagian Ekonomi yaitu Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah. Pencapaian program tersebut dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2018 dapat dilihat pada Tabel. 2.8 berikut :

**Tabel. 2.3.8**  
**Capaian Program pada Kebijakan dan Koordinasi**  
**Perekonomian daerah Tahun 2011 s.d 2018**

No	Capaian Program	Realisasi (dokumen)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kebijakan ekonomi	3	3	1	3	7	3	3	3
2.	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi	2	2	2	-	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2018

Dokumen kebijakan yang dihasilkan berupa kajian dan telaahan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan dan arah sektor perekonomian yang ada di Kota Depok. Hasil dari dokumen tersebut berupa laporan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Sedangkan koordinasi bidang ekonomi berupa fasilitasi-fasilitasi seperti Forum Ekonomi Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas isu-isu perekonomian Kota bersama para stakeholders dan menghasilkan beberapa point rekomendasi untuk pimpinan dan dasar kebijakan serta program ekonomi kedepan. Sedangkan untuk Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan bertujuan membahas tingkat inflasi dan upaya-upaya dalam mengendalikan inflasi daerah.

Pada Tahun Anggaran 2013, target pemenuhan dokumen kebijakan belum tercapai karena adanya keterbatasan anggaran yang rencananya akan dipenuhi sesuai capaian RPJMD pada Tahun Anggaran 2016. Rincian Rekapitulasi Dokumen Kebijakan yang telah dihasilkan diantaranya adalah seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3.9**  
**Rekapitulasi beberapa Dokumen Arah Kebijakan Bidang Ekonomi**  
**Tahun 2011 s.d 2018**

Tahun	Uraian
2011	1. Kebijakan Penetapan Prioritas Program CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) di Kota Depok
	2. <i>Grand Design</i> Pengembangan UMKM di Kota Depok
	3. Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Depok
2012	4. Arah Kebijakan Pengembangan Iklim yang Mendorong Industri Kreatif di Kota Depok
	5. Arah Kebijakan Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Kota Depok
	6. Arah Kebijakan Peningkatan Keragaman Konsumsi serta Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2013	7. Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kota Depok
2014	8. Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
	9. Kajian Outcome Program Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok
	10. Kebijakan Pertanian Insentif Pengembangan Belimbing sebagai Ikon Kota Depok
2015	11. Studi Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar Kota Depok
	12. Klasifikasi dan Potensi Koperasi Berkualitas di Kota Depok
	13. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Unggulan

Tahun	Uraian
2016	14. Penyusunan Arah Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok
	15. Penyusunan Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
	16. Kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan Koperasi
2017	17. Penyusunan Arah Kebijakan Perdagangan/Perindustrian (Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima)
	18. Penyusunan Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif (Kajian Penataan Transportasi Online di Kota Depok)
2018	19. Penyusunan Arah Kebijakan Pertanian/Ketahanan Pangan/Perkebunan/Perikanan (Kajian Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan)
2019	20. Penyusunan Arah Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kota Depok

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019

Sementara untuk Rekapitulasi Dokumen Rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Ekonomi Kota Depok diantaranya adalah :

**Tabel 2.3.10**  
**Rekapitulasi Dokumen Rekomendasi Forum Ekonomi Kota Depok**  
**Tahun 2011 s.d 2019**

Tahun	Uraian
2011	1. Prioritas Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Depok
2012	2. Peran Industri Dalam Penyediaan Pangan Sehat Bagi Kecerdasan Anak di Kota Depok
2014	3. Peningkatan Peran Perbankan dalam Pengembangan Perdagangan dan Jasa di Kota Depok
	4. Peningkatan Peran Dunia Usaha Minyak dan Gas dalam Sinergi Pembangunan Ekonomi di Kota Depok

Tahun	Uraian
2015	5. Arah Kebijakan dan Langkah Strategi Peningkatan Daya Saing Perekonomian Kota Depok
	6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok yang Berkualitas melalui Peran IKM dan UMKM yang Berdaya Saing
2016	7. Rekomendasi Arah Kebijakan Investasi di Kota Depok sebagai alternatif rencana optimalisasi pasar menjadi Perusahaan Daerah atau BLUD
2017	8. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Depok
	9. Kondisi Perekonomian Nasional, Peluang dan Tantangan bagi Pengembangan Ekonomi di Daerah
2018	10. Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kota Depok
	11. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Finansial untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok
2019	12. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Kota Depok
	13. Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan Mikro di Kota Depok

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok

## 8. Aspek Penataan Produk Hukum dan Layanan Hukum

Dalam aspek regulasi terutama menyangkut penyusunan dan penataan produk hukum, telah dilakukan pelayanan administratif dokumentasi dan informasi produk hukum, pembuatan rumusan produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan daerah, yang terakomodir dalam program Penyusunan dan Pengembangan Produk Hukum sedangkan pada program Penanganan Permasalahan Hukum kegiatan yang dilaksanakan antara lain : penyediaan layanan advokasi

hukum bagi aparatur, penyuluhan hukum (fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan), pembentukan kelompok dan lomba sadar hukum.

Adapun produk hukum yang diterbitkan selama kurun waktu Tahun 2011 s.d 2019 sebagai berikut :

**Tabel. 2.3.11**  
**Rekapitulasi Produk Hukum Tahun 2011 s.d 2019**

No	Tahun	Produk Hukum	Banyaknya	Jumlah
1.	2011	Peraturan Daerah	21	801
		Peraturan Walikota	55	
		Keputusan Walikota	605	
		Perjanjian/ MoU	120	
2.	2012	Peraturan Daerah	20	833
		Peraturan Walikota	67	
		Keputusan Walikota	583	
		Perjanjian/ MoU	163	
3.	2013	Peraturan Daerah	17	1093
		Peraturan Walikota	57	
		Keputusan Walikota	533	
		Perjanjian/ MoU	486	
4.	2014	Peraturan Daerah	11	899
		Peraturan Walikota	65	
		Keputusan Walikota	468	
		Perjanjian/ MoU	355	
5.	2015	Peraturan Daerah	11	664
		Peraturan Walikota	54	
		Keputusan Walikota	495	
		Perjanjian/ MoU	104	
6.	2016	Peraturan Daerah	11	559
		Peraturan Walikota	79	

No	Tahun	Produk Hukum	Banyaknya	Jumlah
		Keputusan Walikota	411	
		Perjanjian/ MoU	58	
7.	2017	Peraturan Daerah	21	571
		Peraturan Walikota	85	
		Keputusan Walikota	422	
		Perjanjian/ MoU	43	
8.	2018	Peraturan Daerah	15	647
		Peraturan Walikota	99	
		Keputusan Walikota	506	
		Perjanjian/ MoU	27	
9.	2019	Peraturan Daerah	7	533
		Peraturan Walikota	79	
		Keputusan Walikota	439	
		Perjanjian/ MoU	8	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa produk hukum yang dihasilkan setiap tahunnya melebihi dari yang ditargetkan pada RPJMD 2011-2016 berupa 450 produk hukum setiap tahunnya.

#### 9. Aspek Layanan Pengadaan

Bagian Layanan Pengadaan dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah sebelumnya merupakan salah satu Sub Bagian yang berada dibawah Bagian Pembangunan yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Hingga Agustus 2016, personil pada Bagian Layanan Pengadaan berjumlah : 32 orang, yang terdiri dari :

- Struktural : 4 orang;
- Kelompok Kerja (Pokja) : 18 orang;  
Terdiri dari 5 orang JFT Pengadaan Barang dan Jasa
- JFT Pranata Komputer : 3 orang;
- Fungsional Umum : 7 orang.

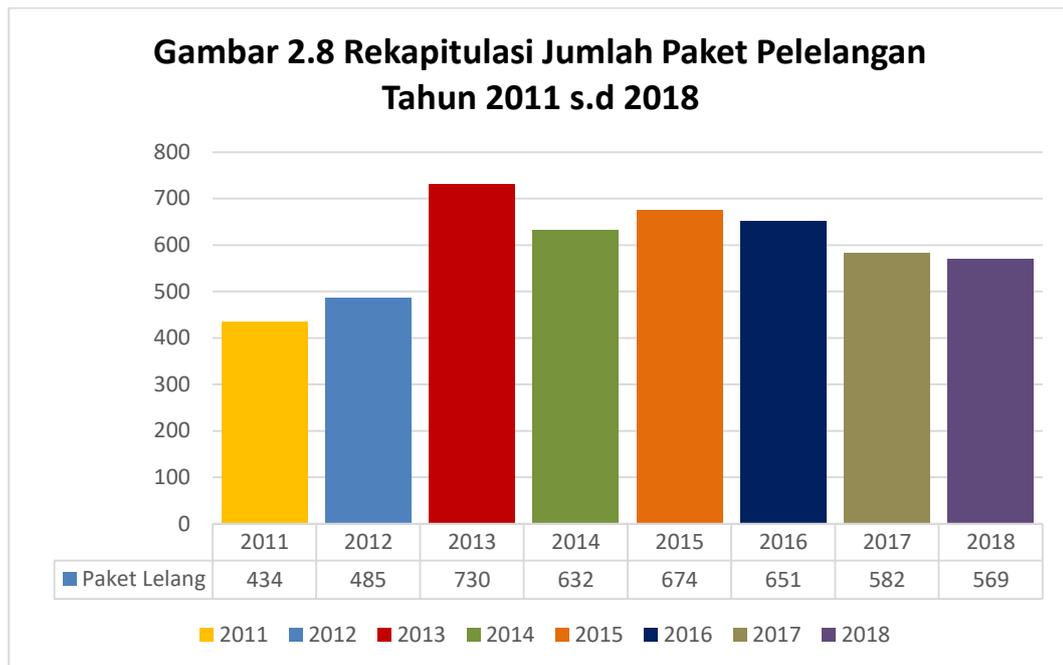
Dari 18 orang aparatur pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, baru 5 orang diantaranya menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Adapun anggota Kelompok Kerja (pokja) lainnya merupakan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Fungsional Umum.

Jika dilihat dari jumlah personil Pokja ULP yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah minimal 30 orang dan maksimal 50 orang, yang berarti dari segi kuantitas belum terpenuhi. Adapun keunggulan yang dimiliki dari segi sumberdaya manusia adalah status kepegawaian anggota Pokja telah terpisah dari OPD pelaksana pengadaan barang jasa, yang pada beberapa Pemerintah Daerah masih bersifat *ad-hoc* dan secara status kepegawaian masih menyatu pada masing-masing OPD.

Hal lain yang menjadi target pencapaian Layanan Pengadaan adalah penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan diusulkan dengan kegiatan Penyusunan SOP

dan Tatalaksana Barang/Jasa serta pembangunan Sistem Informasi Managemen Data Pengadaan.

Berikut akan ditampilkan jumlah paket pelelangan yang masuk dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2019 pada Gambar 2.8 berikut.



Sumber : Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2018

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Sekretariat Daerah pada khususnya serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya.

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang menjabarkan tingkat capaian kinerja serta hambatan yang masih dihadapi

dan dinilai perlu diatasi dari berbagai aspek sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat secara garis besar tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok menemui berbagai tantangan yang menjadi kendala namun Sekretariat Daerah Kota Depok juga memiliki peluang dalam upaya pengembangan pelayanan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu hasil analisis berdasarkan Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dan masukan untuk pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok pada lima tahun mendatang. Sub Bab ini mengemukakan berbagai pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain :

#### **2.4.1 Tantangan**

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja maka dapat dirumuskan tantangan yang ada pada organisasi Sekretariat daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan tantangan bagi para pengelola keuangan OPD untuk terus mengupdate setiap informasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan keuangan;
2. Penguatan peran kecamatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka diperlukan optimalisasi peran camat dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan salah satunya dengan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada setiap Kecamatan di Kota Depok;
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah baik dalam dan kemungkinan kerjasama luar negeri, upaya peningkatan efektifitas tersebut salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin;
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menciptakan inovasi daerah yang merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsiperangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
7. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Kompleksitas isu-isu strategis bidang Hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada khususnya serta Organisasi Perangkat Daerah lain pada umumnya;
9. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Depok sebagai Kota Niaga dan Jasa serta membina BUMD;
10. Menggiatkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyiapkan rumusan instrumen kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana CSR agar dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Depok sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah;
11. Masih belum efektifnya koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat daerah sehingga juga mempengaruhi koordinasi OPD yang secara koordinatif berada dibawahnya;

12. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah, belum semua OPD memiliki SOP dan menjalankan SOP yang ada;
13. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah dan belum rampungnya penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga belum dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebutuhan dan pemetaan pegawai;
14. Pelimpahan kewenangan belum dapat berjalan secara optimal karena masih kurangnya dukungan anggaran dan *supervise* dari OPD pemangku urusan;
15. Koordinasi pada instansi vertikal belum berjalan secara optimal yang berdampak pada ketercapaian kinerja khususnya dalam permasalahan pengadaan tanah Pemerintah Kota;
16. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum, peraturan daerah dan HAM;
17. Tantangan untuk menaikkan Skala Kematangan Layanan Pengadaan Kota Depok.

#### 2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Depok adalah antara lain :

1. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi teknologi informatika dapat dimanfaatkan untuk mengetahui setiap informasi yang baru terhadap peraturan-peraturan yang berlaku

dan dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan keuangan

2. Adanya upaya peningkatan transparansi dan *e-procurement* dilanjutkan pembangunan sistem informasi manajemen data pengadaan barang/jasa yang dalam implementasinya diharapkan mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keamanan data, dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada akhirnya persaingan sehat yang adil dan *non-diskriminatif* antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi dan efektifitas belanja daerah dapat diwujudkan;
3. Adanya komitmen bersama dan semangat bersama antara pimpinan dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah untuk maju bersama mengatasi permasalahan yang ada.

## **BAB III**

# **Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Sekretariat Daerah**

---

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan, dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan Pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang belum dapat diantisipasi.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

Dalam penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 permasalahan pembangunan di kota Depok diidentifikasi terlebih dulu agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu,

terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Isu strategis bagi Sekretariat Daerah diperoleh baik dari analisis internal berupa indentifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD dimasa lima tahun mendatang. Hasil indentifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Sesuai dengan Target SAKIP Setda pada Renstra dan Target SAKIP Kota pada RPJMD
2.		Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelesaian Hambatan dan Kendala dalam Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
3.		Meningkatkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pembangunan	Penerapan Tata Kelola Admnistrasi Pembangunan yang Belum Merata dan Konsisten
4.		Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Terkendalanya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum karena adanya Perubahan Kebijakan Pusat yang dinamis dan tumpang tindih
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Visi Kota Depok menjadi Kota yang Religius	Belum Adanya Dasar Hukum dan Indikator yang Tepat dalam Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Pencapaian Kota Religius

Dari Tabel diatas teridentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat daerah antara lain :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang penyusunan arah kebijakan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pembangunan.
- 4) Menjalin Koordinasi dan Fasilitasi yang Intensif dan berkesinambungan terkait penyusunan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Merumuskan kajian atau peraturan daerah / peraturan wali kota sebagai landasan atau dasar hukum dalam rangka meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan visi kota Depok menjadi kota yang religius.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah. Sesuai dengan permasalahan diatas capaian kinerja sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok, maka beberapa permasalahan mendasar yang harus dipecahkan agar pencapaian tujuan 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih baik. Adapun isu-isu yang penting untuk dipecahkan Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika nasional	Dinamika Regional/lokal	Lain-lain
1.	Peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean	Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, restrukturisasi organisasi manajemen publik, Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, penggunaan sumberdaya aparatur daerah, serta kerjasama dan inovasi daerah	Bermunculannya kreatifitas masyarakat dibidang teknologi informasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat

## **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

### **3.2.1. Visi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

#### **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”**

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

### **3.2.2. Misi**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan

transparan.

- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
- 3) Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
- 4) Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan

masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha mikro yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial

bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

**Tabel 5.1**

**Keselarasan Misi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025  
Dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021**

<b>Misi RPJMD 2016-2021</b>		<b>Misi RPJPD 2006-2025</b>	
Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Misi 5	Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.
Misi 2	Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing	Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

Misi RPJMD 2016-2021		Misi RPJPD 2006-2025	
Misi 3	Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	Misi 1	Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
Misi 4	Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	Misi 2	Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
		Misi 4	Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
Misi 5	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**

No	Misi Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan</b>				
1.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah	Pemahaman tugas dan fungsi masih belum optimal sehingga masih terdapat ego sektoral	Semangat bersama untuk membenahi dan mengakui bahwa dibutuhkan koordinasi yang baik dan peran

No	Misi Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			atau ego urusan	seluruh unsur memegang peranan penting tercapainya tujuan kota
2.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Kurangnya kapasitas SDM yang sesuai kualifikasi tugas dan fungsi	Sudah adanya tim penyusun LPPD yang berasal dari gabungan perangkat daerah
3	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Belum optimal penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Kuantitas SDM pokja belum ideal bila dibandingkan dengan banyaknya paket yang ada	Sudah direncanakan pengadaan sistem untuk pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
4	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Belum optimalnya kualitas produk hukum yang sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Produk hukum yang dibuat mesti menunggu payung hukum dari pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan	Setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan payung hukum

No	Misi Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara</b>				
1	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Belum optimalnya perencanaan pelaksanaan kegiatan keagamaan	Banyaknya pelayanan keagamaan serta fasilitasi hari besar yang ada	Profil masyarakat yang heterogen namun kondisi keamanan cenderung kondusif
2	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Belum tersedianya data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan terkait pembinaan lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan	Kapasitas sumber daya aparatur yang belum memadai dalam melaksanakan program	Besarnya perhatian terhadap program sosial keagamaan dan kemasyarakatan karena salah satu janji walikota terakomodir didalamnya

### 3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan Kota Depok lima tahun yang akan datang. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari

suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Misi I (Pertama) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan misi pertama adalah :

Meningkatkan kualitas pelayanan

Sasaran dari tujuan ini adalah :

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

Misi II (Kedua) :Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.

Tujuan misi kedua adalah:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing;

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial ;
4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat;

Misi III (Ketiga) : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan

Berkeadilan

Tujuan misi ketiga adalah:

Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan

Sasaran tujuan ini adalah :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan .

Misi IV (Keempat) :Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan misi keempat adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

Sasaran dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

Tujuan : 2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah

keluarga;

Sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman

Tujuan : 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan;

Sasaran dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air

Tujuan : 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah;
2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup;
3. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city)
4. Tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga

Misi V (Kelima) : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan misi kelima adalah:

Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai - nilai agama dan kebangsaan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kohesi Sosial
2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama

**Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok**

**VISI:**

**KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS**

MISI	TUJUAN	SASARAN
<b>Misi I (Pertama) :</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik
<b>Misi II (Kedua):</b> Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial</li> <li>4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat</li> </ol>
<b>Misi III (Ketiga) :</b> Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yangberkualitas</li> <li>2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya ketersediaan</li> </ol>

MISI	TUJUAN	SASARAN
		dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan
	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Meningkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
	2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman
	3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah; 2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup; 3. Terwujudnya depok sebagai kota bersih (zero waste city) 4. Tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p><b>Misi V (Kelima):</b>  <i>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.</i></p>	<p>Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai - nilai agama dan kebangsaan</p>	<p>1. Meningkatnya Kohesi Sosial                  2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama</p>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Depok periode 2016-2021 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Sekretariat Daerah agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Depok ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Sekretariat Daerah Kota Depok dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kota. Saat ini Kota Depok terus berupaya dalam meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah *Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa*”.

Sama halnya dengan Sekretariat Daerah yang menjadi poros dalam roda pemerintahan Kota Depok diharapkan dapat menghadirkan dan mengkoordinasikan antar masing-masing Badan, Dinas serta Lembaga yang berada dibawah Sekretariat Daerah serta berkolaborasi dan bersinergi bersama legislatif, judikatif serta instansi vertikal dalam membangun masyarakat Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

**Tabel. 3.3**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok	Sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
1.	Predikat SAKIP	BB (nilai evaluasi SAKIP Tahun 2018)	Meningkatkan Kinerja OPD	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN
2.	Predikat LPPD	Sangat Tinggi (evaluasi atas LPPD 2018)	Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN
3.	Presentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana	Terpenuhinya program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana sebesar 75%	Adanya kesesuaian rencana dengan realisasi anggaran	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, laporan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok	Sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	Pencapaian harmonisasi produk hukum daerah (Perda, Perwal, SK dan MoU) yang setiap tahunnya diatas target yang ditetapkan	Meningkatkan kualitas dan harmonisasi produk hukum	Tersedianya program legislasi, produk hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa serta advokasi hokum
5.	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai rencana	Terlaksananya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	-

### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah ditetapkan visi pembangunan 2005-2025, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberika rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a) Pembangunan SDM;

- b) Pembangunan Infrastruktur;
- c) Penyederhanaan Regulasi;
- d) Penyederhanaan Birokrasi;
- e) Transformasi Ekonomi.

Identifikasi isu strategis Kementerian Dalam Negeri untuk periode 2020-2024 adalah :

- a) Stabilitas politik dalam negeri;
- b) SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
- c) Tata kelola pemerintahan daerah dan desa;

Berdasarkan uraian di atas, point – point yang berkaitan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Daerah Kota Depok adalah mendukung misi kedelapan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dan melaksanakan arahan keempat Presiden Indonesia yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” serta berkaitan dengan isu strategis ketiga Kementerian Dalam Negeri yaitu “tata kelola pemerintahan daerah dan desa”.

Berdasarkan uraian tentang Renstra Sekretariat Daerah Jawa Barat maupun Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat Sekretariat Daerah Kota Depok dalam menjalankan peran tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor – Faktor Penghambat :

- 1) Penerapan dan penilaian reformasi birokrasi yang belum optimal;
- 2) Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur;
- 3) Dukungan sarana prasarana kantor yang belum optimal;
- 4) Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah dan belum rampungnya penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga belum dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebutuhan dan pemetaan pegawai;
- 5) Lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Faktor – Faktor Pendorong :

- 1) Perkembangan teknologi yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah;
- 2) Perluasan jejaring IT yang optimal dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal;
- 3) Adanya kewenangan dalam perumusan kebijakan;
- 4) Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan
- 5) Lokasi geografis yang potensial yang mendukung koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

- 6) Keselarasan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Depok dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden Republik Indonesia.

**Tabel. 3.3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penyelesaian segmen batas antar daerah masih belum optimal, bahkan diantaranya mengalami <i>deadlock</i> yang berujung kepada munculnya konflik horizontal	Penyelesaian segmen batas baik antar daerah perbatasan maupun internal batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan pematokan pada koordinat yang sudah disepakati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum sepakatnya/mufakatnya warga dengan pemerintah kota terkait segmen batas</li> <li>• Belum optimalnya implementasi pendelegasian kewenangan kecamatan dan belum ada evaluasi dan revisi Perwal No. 10 tahun 2011 tentang Wewenang Kecamatan</li> </ul>	Telah disusunnya Raperda pendelegasian kewenangan kecamatan namun belum adanya kebijakan yang lebih teknis dilapangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat	Belum ditetapkan kewenangan dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang dilaksanakan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang ada</li> <li>• Belum semua OPD memiliki dan menjalankan SOP yang ada</li> </ul>	Bagian Ortala sebagai koordinator, terus menginisiasi penyusunan SOP disertai bimtek kepada Perangkat Daerah
3.	Belum meratanya pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, sehingga perlu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah/ desa,	Masih timpangnya IPM antar kecamatan akibat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum efektifnya koordinasi antar bagian lingkup sekretariat daerah sehingga mempengaruhi</li> <li>• koordinasi Perangkat Daerah dibawahnya</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan belum berjalan optimal</li> <li>• Belum optimalnya perencanaan strategis perangkat daerah</li> </ul>	Terus mengefektifkan fungsi asisten sebagai kordinator bagian dan Perangkat daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	mengembangkan pembangunan daerah dan desa berbasis maritim serta sumberdaya alam		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat/Kelompok belum memahami mekanisme pengajuan dan prosedur hibah/ bantuan sosial keagamaan sesuai aturan yang berlaku</li> </ul>	
4.	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat organisasi/ unit kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dibuat SOP sesuai uraian tugas serta belum dijalankannya secara optimal SOP yang ada di Sekretariat Daerah</li> <li>Evaluasi Kinerja kelembagaan belum optimal</li> <li>Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas SDM yang ada untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik</li> </ul>	

### 3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Tahun 2018-2023, yaitu : **“Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Dengan 5 (lima)

Misi yang ditetapkan adalah :

- 1) Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa;
- 2) Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
- 3) Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan isu strategis dirumuskan sebanyak 19 (sembilan belas) isu strategis, antara lain :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- 2) Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- 3) Penataan Ketataklasaan;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 6) Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;

- 7) Optimalisasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 8) Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
- 9) Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- 10) Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 11) Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
- 12) Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 13) Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- 14) Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 15) Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
- 16) Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;
- 17) Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;
- 18) Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
- 19) Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Merujuk dari uraian di atas, misi dan isu strategis yang berkaitan antara Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekretariat Daerah

Kota adalah Misi kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota” dan beberapa isu strategis.

**Tabel. 3.3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kinerja OPD	Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi antar PD dan ego sektoral</li> <li>• Belum terintegrasinya sistem e-SAKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan fungsi asisten dan rakor setiap hari senin</li> <li>• Sistem e-SAKIP akan dikembangkan dengan bekerjasama/mengadope dari Kota Bandung</li> </ul>
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Terdapat beberapa indikator/ capaian kinerja perangkat daerah yang masih rendah	Adanya sistem evaluasi yang dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan umum	Belum optimalnya pelayanan administratif perangkat daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update informasi baik dengan sosialisasi maupun konsultasi</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin mudahnya mengakses informasi</li> </ul>
4.	Adanya kesesuaian rencana dengan realisasi anggaran	Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan perencanaan belum optimal dan belum diapresiasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviu dari tahapan perencanaan mulai dilaksanakan</li> </ul>
5.	Meningkatnya persentase kepatuhan OPD/ biro dalam pelaporan kinerja	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi		
6.	Terwujudnya pendistribusian barang yang tepat sasaran	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Penyusunan kebutuhan pada tahapan perencanaan belum akurat	Penyusunan RKBU secara selektif mulai untuk diterapkan
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum dibuatnya peraturan terkait standar pelayanan bagi perangkat daerah pelayanan	Akan segera disusun standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	Meningkatnya standarisasi kerja organisasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum dievaluasinya standar pelayanan pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Selama ini dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara parsial pada beberapa perangkat daerah pelayanan
9.	Meningkatkan kualitas dan harmonisasi produk hukum	Belum optimalnya kualitas produk hukum yang sesuai keutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan	Masih kurangnya pemahaman terhadap penyusunan produk hukum daerah	Pelaksanakan bimtek <i>legal drafting</i> bagi aparatur pada perangkat daerah
10.	Peningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Belum optimalnya perencanaan pelaksanaan kegiatan keagamaan	Masih kurangnya akurasi dalam penyusunan perencanaan keagamaan	Anggaran yang tersedia sebagai konsekuensi dalam mendukung pencapaian visi Kota Depok yang Religius
11.	Terfasilitasinya pelayanan kepada lembaga/ organisasi sosial keagamaan	Belum tersedianya data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan terkait pembinaan lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya sistem</li> <li>• Kualitas aparatur belum mumpuni</li> </ul>	Sinergitas dan kerjasama yang baik dengan instansi vertical

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah kota Depok ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok. Hasil telaahan struktur ruang Kota Depok dapat terlihat pada tabel berikut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi :

- 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota;
- 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 - 2032. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. KLHS wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan Visi, Misi daerah. Dalam Penyusunan RPJMD memuat hasil masukan dari analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu instrument yang mampu memberikan rekomendasi dengan focus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan wali Kota Depok Nomor 100 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretraiat Daerah Kota Depok memiliki peran membantu wali kota dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, meskipun tidak berkaitan langsung dengan RTRW

dan KLHS pada RPJMD tetapi Sekretariat Daerah Kota Depok berkewajiban untuk ikut mendukung Pelaksanaan KLHS dan RTRW.

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

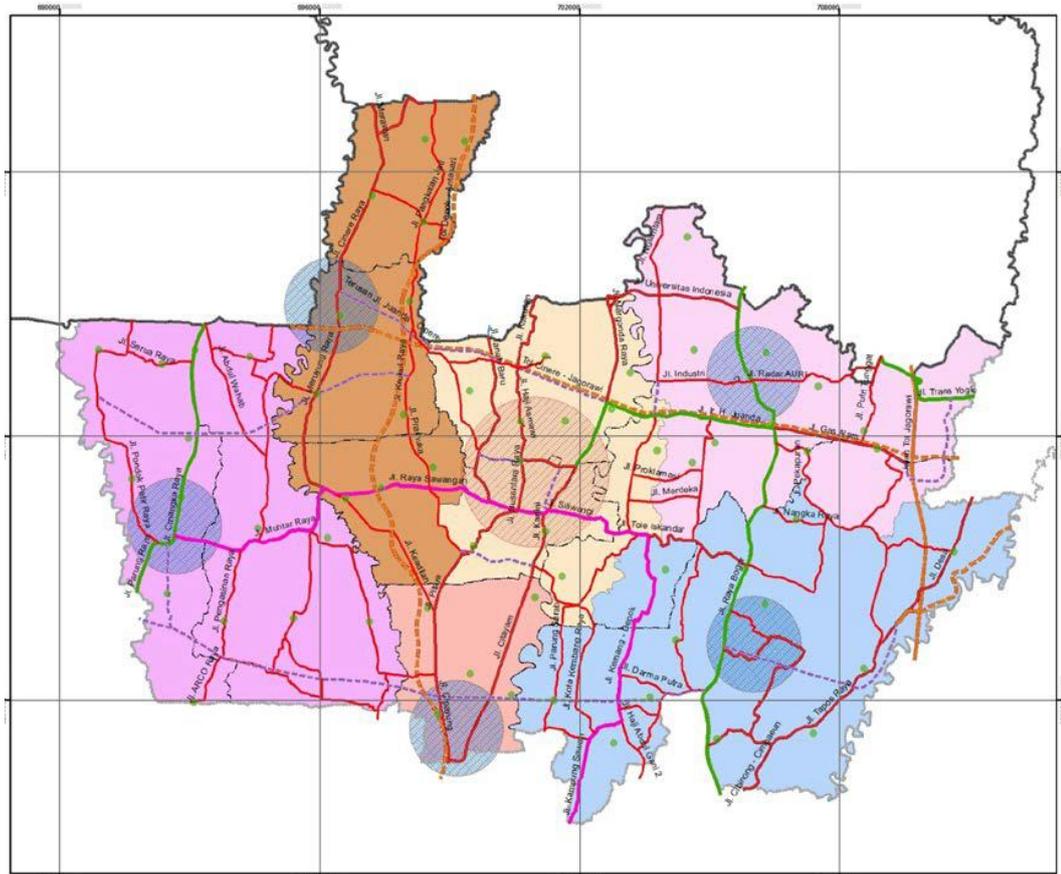
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi : 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-

masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini yang meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- 2) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Cipayung sebagai pusat pelayanan yang melayani subwilayah kota; dan
- 3) Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota dapat mencakup satu kelurahan atau beberapa kelurahan.

Gambar 3.4.1. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini meliputi:

- 1) pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
- 2) pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
- 3) pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

**Tabel 3.4.1. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032**

SPK/PPK	Lokasi	Arah Pengembangan Sektor	
PPK	Beji	Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kantor pemerintahan</li> <li>2. pendidikan tinggi</li> <li>3. perdagangan dan jasa skala regional</li> <li>4. terminal terpadu</li> <li>5. perumahan kepadatan tinggi (vertikal)</li> <li>6. konservasi budaya dan</li> <li>7. RTH kota</li> </ol>
Pancoran Mas		Mampang, Depok, Depok Jaya dan Pancoran Mas	
Sukmajaya		Mekarjaya dan Tirtajaya	
SPK CINERE	Cinere	Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pariwisata</li> <li>2. pendidikan tinggi</li> <li>3. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota</li> <li>4. perumahan kepadatan sedang dan</li> <li>5. RTH kota</li> </ol>
Limo		Limo, Meruyung, Grogol dan Krukut.	
Pancoran Mas		Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru	

SPK/PPK	Lokasi	Arah Pengembangan Sektor	
SPK SAWANGAN	Bojongsari	Bojongsari, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Curug, Duren Mekar dan Duren Seribu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pariwisata;</li> <li>2. perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan);</li> <li>3. agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias);</li> <li>4. pertanian;</li> <li>5. perumahan kepadatan rendah dan</li> <li>6. RTH kota</li> </ol>
Sawangan		Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih	
SPK CIPYAUNG	Cipayung	Cipayung, Cipayung Jaya, RatuJaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota</li> <li>2. perumahan kepadatan rendah;</li> <li>3. kawasan SNADA;</li> <li>4. industry; dan</li> <li>5. RTH kota.</li> </ol>

SPK/PPK	Lokasi	Arah Pengembangan Sektor	
SPK TAPOS	Cilodong	Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdagangan dan jasa skala regional;</li> <li>2. terminal tipe A;</li> <li>3. industri;</li> <li>4. jasa pergudangan;</li> <li>5. perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah;</li> <li>6. pusat sosial budaya;</li> <li>7. kawasan pertahanan dan keamanan Negara</li> <li>8. RTH Kota</li> </ol>
Sukmajaya		Sukmajaya	
Tapos		Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos dan Leuwinanggung	
SPK CIMANGGIS	Cimanggis	Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan, Harjamukti dan Curug	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdagangan dan jasa skala regional;</li> <li>2. industri;</li> <li>3. perumahan kepadatan sedang;</li> </ol>

SPK/PPK	Lokasi	Arah Pengembangan Sektor	
			4. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 5. RTH kota.
Sukmajaya		Cisalak, Baktijaya dan Abadijaya	
Tapos		Sukatani	
PL	Seluruh Kelurahan	kegiatan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi	

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat dalam melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dapat dilihat dari tabel 3.4.2 berikut :

**Tabel. 3.4.2. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penerbitan produk hukum yang terkait Rencana Wilayah Pengembangan Kota (Pasal 20): Margonda, Cinere, Sawangan, Citayam, Tapos, dan Cimanggis	Rencana struktur dan pola ruang kota yang sudah direncanakan pada dokumen RTRW belum sepenuhnya bisa dilaksanakan	Sekretariat Daerah hanya berfungsi sebagai koordinator sementara yang melaksanakan adalah SKPD teknis	Telah ada dokumen kajian RTRW Kota Depok

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai bagian dalam aktivitas perekonomian regional, nasional maupun internasional. Kota Depok memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar dibawah ini terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

**Gambar 3.4.2**  
**17 Tujuan TPB/SDGs**



Dengan melihat permasalahan dihadapi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Depok, disepakati terdapat 5 isu yang akan ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD yaitu sebagai berikut :

- 1) Air bersih dan sanitasi layak;
- 2) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Kota dan permukiman yang berkelanjutan;
- 4) Kehidupan sehat dan sejahtera;
- 5) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari ke 5 isu strategis pada KLHS RPJMD tersebut di atas, Bappeda Kota Depok memiliki keterkaitan erat terhadap 4 (empat) dari 5 isu prioritas TPB/SDGs di Kota Depok, 4 tujuan tersebut yaitu tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 6, 8, 11 dan 17

- **TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak** - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.;
- **TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.;
- **TPB 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.;
- **TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** – Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat dari pelayanan Bappeda Kota Depok yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS dapat disampaikan sebagai berikut :

a) Lemahnya koordinasi lintas Perangkat Daerah.

Air bersih dan sanitasi merupakan program lintas sektor yang sangat membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai target sesuai dengan rencana diperlukan perencanaan air bersih dan sanitasi yang baik, seperti adanya perencanaan yang terintegrasi dalam penyusunan SSK yang diterjemahkan ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Setidaknya ada 4 Perangkat Daerah yang terlibat dalam isu strategis Air bersih dan sanitasi, antara lain : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, PDAM sebagai BUMD di bidang air minum. Ditambah dengan adanya Forum PKP pada Pokja PKP yang melibatkan pihak swasta dan pengembang dalam implementasi Program air bersih dan sanitasi. Begitu juga dengan isu Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Kemitraan untuk mencapai tujuan adalah merupakan isu yang diampu oleh lintas Perangkat Daerah yang membutuhkan koordinasi yang baik dalam penyelesaian isu-isu KLHS.

b) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum dilakukan secara optimal dan belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang

dapat menghimpun seluruh produk Bappeda maupun oleh Dinas Teknis secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat di bidang air bersih dan sanitasi merupakan faktor pendorong. Dengan adanya inovasi yang ada, tentunya semakin mempermudah Perangkat Daerah dan masyarakat dalam menangani permasalahan air bersih dan sanitasi.
- b) Sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi dengan metode hybrid maupun daring sesuai protokol Kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan skpd berdasarkan telaahan kajian lingkungan hidup strategis beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 3.4.2. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai daya tampung lingkungan hidup, dampak resiko lingkungan hidup, layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan	Kebijakan terkait kelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap kelestaraan lingkungan hidup termasuk pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan belum optimal dan masih mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota	Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Depok, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global ( <i>global warming</i> )	Sekretariat Daerah sebagai OPD pendukung berperan dalam lingkungan hidup strategis ini melalui program Pembentukan, Penataan Produk hukum yang mendukung pembentukan aturan aturan dalam pelaksanaan RTRW kota dan menjadi koodinator antar instansi sehingga terjalin koordinasi antar instansi agar berjalan dengan baik, sehingga

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati untuk pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama			pelaksanaan program lingkungan hidup yang belum memberikan hasil optimal dapat menjadi lebih maksimal
---	--	--	---

**Tabel. 3.4.3**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Depok terhadap Sekretariat Daerah**

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
1.	Kapasitas daya dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Depok berada pada wilayah konflik yaitu berada pada kawasan KPB (Kawasan Produksi Bebas), kawasan Kota Depok memiliki potensi pengembangan ekonomi pembangunan (Kawasan Budidaya; Industri; dan Permukiman) yang cukup besar;</li> <li>Kawasan lindung yang ada di Depok</li> </ul>	Sekretariat Daerah melalui fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai daya tampung lingkungan hidup, dampak resiko lingkungan hidup, layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan	Sekretariat Daerah sebagai OPD pendukung berperan dalam lingkungan hidup strategis ini melalui program Pembentukan, Penataan Produk hukum yang mendukung pembentukan aturan aturan dalam pelaksanaan RTRW kota dan menjadi koodinator antar instansi sehingga

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
		<p>baru terpenuhi 6,2% dari luas wilayah Kota Depok, luas ini masih kurang dari jumlah yang ditentukan pada seharusnya 30% dari luas wilayah menurut UU Nomor 26 Tahun 2007</p>	<p>sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati untuk pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama</p>	<p>terjalin koordinasi antar instansi agar berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan program lingkungan hidup yang belum memberikan hasil yang maksimal dapat menjadi lebih maksimal</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uraian analisis DDPL serta perkembangan penggunaan lahan Kota Depok saat ini, terjadi ketidakseimbangan daya dukung lingkungan, kawasan lindung yang terjadi saat ini hanya 4,7% dari luas Kota Depok</li> <li>• Daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dipengaruhi oleh aktivitas pelaku pembangunan itu sendiri sehingga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat (laju</li> </ul>	<p>-</p>	<p>-</p>

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
		<p>pertumbuhan 2-3 % pertahun);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan direncana-kan akan diarahkan pada pusat-pusat kota dengan mengadakan kawasan per-mukiman vertikal (Pancoran Mas dan Beji); dapat meningkatkan kemampuan untuk menampung penduduk.</li> </ul>		
2.	Perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan hidup	<p>Prakiraan dampak dan risiko lingkungan adalah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dampak Kebijakan, Rencana atau Program yaitu berkurangnya RTH, Ketersediaan dan Kualitas air dan limbah domestik;</li> <li>2) Komponen berkurangnya RTH, dimana Manfaat langsung dan/atau tidak langsung dari RTH diantaranya adalah keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan;</li> <li>3) Komponen Ketersediaan dan Kualitas</li> </ol>	-	-

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
		<p>Air Bersih, Jika RTRW dilaksanakan maka berdasarkan hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air hanya dapat terpenuhi sampai dengan tahun 2014, sedangkan bila RTRW tidak dilaksanakan maka kebutuhan air di Kota Depok dapat terpenuhi sampai tahun 2014 juga;</p> <p>4) Komponen Pengelolaan Sampah Domestik, Untuk mengatasi permasalahan sampah yang melimpah di Kota Depok, PemkotDepok mulai Tahun 2009 melakukan pengolahan sampah pada skala kawas-an denganmenyediakan 18 Unit Pengelolaan Sampah yang kedepan diusahakan berfungsi optimal. Namun dalam perencanaan wilayah khususnya RTRW, tetap mengutamakan kelestarian fungsi ekologi (lingkungan)</p>		

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
		sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik		
3.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Permasalahan bidang sumber daya alam yang utama adalah tidak efektifnya pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berorientasi pada kepentingan jangka panjang.SDA mengalami pengurangan yang signifikan dan tidak terkendali sehingga terjadi degradasi lingkungan	-	-
4.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Dampak terhadap lingkungan atas berkurangnya lahan tidak terbangun, termasuk didalamnya terdapat Ruang Terbuka Hijau yang paling nyata adalah peningkatan suhu udara. Kota Depok, yang berarti bahwa penyumbang pemanasan global bagi kehidupan manusia di planet Bumi dengan adanya	-	-

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Implikasi terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
		<p>peningkatan suhu udara Kota Depok, selanjutnya akan bermunculan permasalahan-permasalahan lingkungan lainnya akibat ketidaknyamanan pada setiap aktivitas manusia di dalamnya</p>	-	-
5.	<p>Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati</p>	<p>prakiraan dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik akibat proses alamiah maupun akibat aktivitas manusia akan mempengaruhi beberapa komponen diantaranya air, udara, tanah, flora dan fauna</p>	-	-

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Depok pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- 3) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
- 4) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
- 5) Pentingnya kerjasama antar daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif, implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang efisien dan transparan, Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
- 3) Mendorong peningkatan kompetensi Aparatur di dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menunjang kemampuan Aparatur dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 4) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
- 5) Mengefektifkan kerjasama daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai media *sharing* informasi dan teknologi antar daerah.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kota Depok. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis dengan metode SWOT kekuatan/strengths (S), kelemahan/weaknesses (W), peluang/opportunities (O) dan tantangan/threats (T) dengan penentuan alternatif strategis sebagai berikut :



<p><b>Kekuatan/Strengths (S) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM aparatur Pemerintah Kota Depok secara kuantitas cukup memadai</li> <li>2. Komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi</li> <li>3. Pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>4. Peningkatan APBD setiap tahunnya</li> <li>5. Sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah</li> <li>6. Konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi</li> <li>7. Penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Depok</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SD Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;</li> <li>2. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien;</li> <li>3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah;</li> <li>4. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah;</li> <li>5. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>6. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>7. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi Kekuatan-Tantangan (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM;</li> <li>2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan</li> </ol>
---	---	---

<p><b>Kelemahan/Weaknesses (W) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien</li> <li>2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan lain-lain</li> <li>3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif;</li> <li>2. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi Kelemahan-Tantangan (W-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap PD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan;</li> <li>2. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap PD. Dalam rangka perwujudan <i>good governance</i> melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.</li> </ol>
--	--	---

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi segera, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kedepannya atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, diidentifikasi skor kriteria penentuan terhadap isu-isu strategis tersebut pada Tabel. 3.5.2 sebagai berikut :

**Tabel. 3.5.2**  
**Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1.	Merupakan tanggungjawab PD	25
2.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra kota	20
3.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
4.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	15
5.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
6.	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	10
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, pada Tabel 3.5.3 berikut :

**Tabel 3.5.3**  
**Nilai Skala Kriteria Isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Optimalisasi perumusan kebijakan	√					√	35
2.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	√	√	√		√	√	85
3.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	√				√	√	60
4.	Peningkatan evaluasi pelayanan publik	√			√		√	50
5.	Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	√					√	35
6.	Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	√					√	35

Pada tahapan selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis, yang dituangkan dalam tabel. 3.5.3 berikut ini :

**Tabel. 3.5.3 Rata-rata Skor Isu Strategis**

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Optimalisasi perumusan kebijakan	35	4
2.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	85	1
3.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	60	2
4.	Peningkatan evaluasi pelayanan publik	50	3
5.	Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	35	5
6.	Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	35	6

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Depok pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
5. Pentingnya kerjasama antar daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif, implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang efisien dan transparan, Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
3. Mendorong peningkatan kompetensi Aparatur di dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menunjang kemampuan Aparatur dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
5. Mengefektifkan kerjasama daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai media *sharing* informasi dan teknologi antar daerah.

Sejalan dengan keberadaan dan peran strategis Sekretariat Daerah yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka diharapkan Sekretariat Daerah Kota Depok mampu menjadi penggerak dan pengawal penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Adapun Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Depok untuk Tahun 2016-2021 adalah :

1. Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
2. Kualitas Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan

## BAB-IV

# Tujuan dan Sasaran

---

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Perumusan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Sekretariat Daerah yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sedangkan Sasaran merupakan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program prioritas yang penentapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumberdaya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kota Depok yang terkait dengan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebanyak 2 (dua) tujuan yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran serta 9 (sembilan) indikator sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Depok disajikan pada Tabel 4.2.1 berikut.

**Tabel 4.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			Kondisi Akhir
				2016	2019	2020	2021	2021
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Predikat SAKIP	B	B	BB	A	A
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pembangunan	Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	-	80%	850%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	65%	85%	90%	100%	100%

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok pada periode Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Kota Depok 2016-2021 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok. Adapun formulasi perhitungannya dijabarkan pada table 4.2.2.

**Tabel 4.2.2**  
**Formulasi Perhitungan Sasaran Rencana Strategis**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Dasar	Formulasi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	Predikat	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP Permen PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif; Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Formulasi Perhitungan : Penilaian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  <i>n = hasil nilai SAKIP Kota tahun n-1</i>
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD Dan (IKM) Indeks Kesesuaian MateriPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif; Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri melalui Bagian Pemerintahan sesuai Indeks EKPPD Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari 2 variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat ; Formulasi Perhitungan :  <i>n = hasil nilai LPPD tahun n-1</i>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Dasar	Formulasi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan Yang Dilaksanakan Sesuai Target	%	Rekapitulasi capaian kinerja program/ kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bagian di bawah koordinasinya	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif; Sumber Data: Rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bagian dibawah koordinasinya; Formulasi perhitungan :  $x = \frac{\text{Jml program/kegiatan yg dilaksanakan sesuai target} \times 100}{\text{Jumlah program/kegiatan}}$
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	Usulan rancangan produk hukum (Perda, Perwal dan SK) yang diusulkan oleh PD sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif; Sumber Data : Bagian Hukum; Formulasi Perhitungan : Usulan rancangan produk hukum (Perda, Perwal dan SK) yang diusulkan oleh PD sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan formulasi perhitungan :  $x = \frac{\text{Jml rancangan produk hukum yg sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah} \times 100}{\text{Jumlah usulan rancangan produk hukum daerah}}$
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan Sesuai Target	%	Dalam rangka mendukung capaian janji Wali Kota "Pemberian insentif bagi Pembimbing Rohani"	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif; Sumber Data : Bagian Kesejahteraan dan Sosial; Formulasi Perhitungan : Rekapitulasi agenda perayaan hari besar keagamaan ; perhitungan :  $x = \frac{\text{Jumlah perayaan hari besar yang berjalan lancar} \times 100}{\text{Jumlah perayaan hari besar}}$

## **BAB-V**

# **Strategi dan Arah Kebijakan**

---

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada ketentuan umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- 2) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Mengacu pada Peraturan tersebut Sekretariat Daerah Kota Depok merumuskan Strategi dan Kebijakan Sekretariat Kota Depok merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan Misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Depok.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Peran strategis Kota Depok menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearahorganisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

Kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang

berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (aparatur), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional prosedur dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu Rencana Strategis secara berkala untuk

mengetahui ketercapaian/kesinambungan capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin seringnya frekuensi pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada sisa tahun periode Renstra.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Pada setiap unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta pagu indikatif anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Depok.

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Depok, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel. 5.1**  
**Penentuan Strategi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Predikat SAKIP	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Predikat LPPD	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pembangunan	Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan
4.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum sesuai peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
5.	Meningkatnya kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial keagamaan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Depok dalam periode 2016-2021, sebagaimana tabel 5.2 berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan	Peningkatan transparansi keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pembangunan	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan melalui perencanaan
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum sesuai peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan dan penyesuaian produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
<b>MISI V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai – nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial keagamaan	Peningkatan kualitas pelayanan kegiatan sosial dan keagamaan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari Tabel tersebut diatas, dapat diuraikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bagian- bagian Sekretariat Daerah Kota Depok sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan Per Bagian**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok**

Tujuan	Sasaran	Startegi	Kebijakan	Bagian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan	Peningkatan transparansi keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Bagian Administrasi, Bagian ORB, Bagian Umum
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Pemerintahan, Bagian Protokol dan Dokumentasi
	Meningkatkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pembangunan	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan melalui perencanaan	Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang / Jasa, Bagian Ekonomi
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum sesuai peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan dan penyelarasan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Bagian Hukum

Tujuan	Sasaran	Startegi	Kebijakan	Bagian
	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial keagamaan	Peningkatan kualitas pelayanan kegiatan sosial dan keagamaan	Bagian Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya Sekretariat Daerah Kota Depok dalam mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah maka diperlukan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pembangunan
- 4) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum sesuai peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan sosial keagamaan

## BAB-VI

# Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam ketentuan umum disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

- Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Kota melalui Walikota setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP 5 (lima) tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Secara rinci rencana program, kegiatan dan Pendanaan Indikatorifnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Renstra Perubahan Kedua Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							URUSAN PENDUKUNG				72.712.662.509		64.332.945.450		62.501.958.000		195.022.855.659	
							SEKRETARIAT DAERAH				72.712.662.509		64.332.945.450		62.501.958.000		195.022.855.659	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	BB	BB	A	006	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	BB	494.349.900	BB	388.199.900	A	360.508.000	A	1.243.057.800	
						006	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	7 Dokumen;	7 Dokumen	25.800.000	8 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, DPA Setda, DPA KDH/WKDH, DPPA Setda, DPPA KDH/WKDH, RKT dan RKT Perubahan)	34.999.900	7 Dokumen (LAKIP, Semesteran dan Triwulan)	32.337.000	22 Dokumen (LAKIP, Semesteran dan Triwulan)	93.136.900	Bag. Adm
						006	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah Dokumen; Jumlah PEP yang dilatih	1 Dokumen	1 Dokumen	267.150.000	1 Dokumen	265.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	782.150.000	Bag. Ortala
						006	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok	Jumlah Dokumen	4 (empat) buku triwulan; 1 (satu) laporan; 2 (dua) dokumen;	12 Dokumen	201.399.900	12 Dokumen	88.200.000	12 Dokumen; TEPR/Monev BPKP	78.171.000	12 Dokumen	367.770.900	Bag. Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	027	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah	sangat tinggi	sangat tinggi	4.130.575.600	sangat tinggi	3.648.388.900	sangat tinggi	3.130.836.300	sangat tinggi	10.909.800.800		
						Persentase PD yang capaian fisiknya diatas 75%	83%	90%	95%	100%	100%							
					021	Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok	Jumlah Dokumen LPPD; Frekuensi Publikasi LPPD	1 dokumen (60 buku LPPD) 1 Bahan ILPPD	1 Dokumen; 1 kali	195.450.000	1 Dokumen; 1 kali	126.425.000	1 Dokumen LPPD; 1 Kali Publikasi Ringkasan LPPD	101.500.000	3 Dokumen; 3 kali	423.375.000	Bag. Pemerintahan	
					022	Pelaksanaan APEKSI	Jumlah laporan	3 kegiatan	4 laporan	356.670.000	3 kali	356.670.000	3 kali	324.970.000	10 kali	1.038.310.000	Bag. Pemerintahan	
					023	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MOU/ Kerjasama yang dihasilkan	15 MoU	15 naskah, 5 KAD	107.750.000	1 dokumen (15 Mou)	107.750.000	15 MOU	95.000.000	45 MoU	310.500.000	Bag. Pemerintahan	
					024	Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah	Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah laporan rapat evaluasi kerjasama daerah	-	50 orang; 4 laporan	80.900.000	35 peserta; 1 kali	83.050.000	35 peserta; 1 kali	70.000.000	120 org	233.950.000	Bag. Pemerintahan	
					025	Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan dan Laporan	12 kali	12 kali (Laporan)	719.485.000	12 kali	719.485.000	12 kali	730.000.000	36 kali	2.168.970.000	Bag. Pemerintahan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						027	Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Desk Pilkada)	Jumlah Pemantauan dan Monitoring Pilkada	-	-	63 kelurahan	422.034.000	-	-	63 kelurahan	422.034.000	Bag. Pemerintahan	
						027	Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli	Jumlah Laporan	12 bulan	50 laporan	345.560.000	12 Bulan	300.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	945.560.000	Bag. Umum
						027	Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas	Jumlah dokumen	12 Dokumen Laporan	-	-	1 dokumen	61.600.000	15 PD/Unit Kerja; 48 Orang; 48 Orang,	130.000.000	1 dokumen	191.600.000	Bag. Pembangunan
						027	Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen; Jumlah Agen Perubahan yang Dilatih	12 Dokumen Laporan	-	-	1 dokumen; 38 orang	175.000.000	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	300.000.000	Bag. Ortala
						027	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	2 dokumen	171.523.000	-	-	-	2 dokumen	171.523.000	Bag. Ortala	
						027	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen;	-	1 dokumen;	80.950.000	-	-	130.000.000	15 PD/Unit Kerja; 48 Orang; 48 Orang,	15 PD/Unit Kerja; 48 Orang; 48 Orang,	210.950.000	Bag. Ortala
						027	Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok	Jumlah Laporan Rakor Sanitasi; Jumlah Pelaksanaan CSS; Jumlah Pelaksanaan Bintek Sanitasi; Jumlah Dokumen Reviu SSK	-	11 Laporan; 1 Kali; 2 Kali (16 dan 18 orang); 1 Dokumen	348.694.900	3 Jenis (Rakor, Bimtek, dan CSS)	165.374.900	3 Jenis (Rakor, Bimtek, dan CSS)	132.000.000	3 Jenis (Rakor, Bimtek, dan CSS)	646.069.800	Bag. Ortala



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0 2 7	1 6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	-	21 Laporan	33.099.800	24 Kali	34.000.000	10 Laporan	27.199.900	34 Laporan	94.299.700	Bag. Pembangu nan
						0 2 7	1 9 Sinergitas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan	-	2 laporan sidak	67.949.900	2 laporan	75.000.000	2 laporan	60.599.800	6 laporan	203.549.700	Bag. Pembangu nan
						0 2 7	2 0 Sinergitas Forum Ekonomi	Jumlah dokumen rekomendasi	-	2 dokumen	56.250.000	1 kebijakan	75.000.000	1 Kebijakan	59.999.800	3 dokumen	191.249.800	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 1 Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan pengendalian inflasi	-	4 Laporan	60.450.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	79.999.500	12 Laporan	240.449.500	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 2 Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen;	-	1 dokumen	61.800.000	63 Kelurahan	62.000.000	63 Kelurahan	20.665.000	63 Kelurahan	144.465.000	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 3 Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pertanian/ ketahanan pangan/ perkebunan /perikanan	Jumlah Dokumen	2 forum; 2 rekomendasi	1 dokumen	113.575.000	-	-	-	-	1 dokumen	113.575.000	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 4 Monitoring Evaluasi Pemilu Serentak 2019 ( desk Pemilu )	Jumlah Pemantauan dan Monitoring Pemilu	1 dokumen rekomendasi	63 kelurahan	245.483.000	-	-	-	-	63 kelurahan	245.483.000	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 5 Penyusunan Budaya Organisasi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	198.925.000	-	-	-	-	1 dokumen	198.925.000	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 6 Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perdagangan dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 Dokumen	80.000.000	2 dokumen	180.000.000	Bag. Ekonomi
						0 2 7	2 7 Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Investasi	Jumlah Laporan	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 laporan	79.998.300	2 dokumen	179.998.300	Bag. Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						027	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang BUMD	Jumlah Dokumen	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	Bag. Ekonomi		
						027	Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pangan dan Koperasi	Jumlah dokumen	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 Dokumen	80.005.000	2 dokumen	180.005.000	Bag. Ekonomi		
						027	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen; Jumlah OPD yg dievaluasi	-	-	-	-	1 dokumen; 38 OPD	100.000.000	1 dokumen; 38 OPD	100.000.000	Bag. Ekonomi		
						027	Monitoring Hasil Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 (Desk Pilkada)	Jumlah Monitoring; Jumlah Koordinasi	-	-	-	-	11 Kecamatan; 20 Kali	78.234.000	11 Kecamatan; 20 Kali	78.234.000	Bag. Ekonomi		
						022	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan e-government Terintegrasi</b>	<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>410.304.300</b>	<b>50%</b>	<b>341.750.000</b>	<b>50%</b>	<b>272.500.000</b>	<b>187.500.000</b>		
						022	Penyediaan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan	Jumlah Sistem yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	-	67.500.000	-	-	1 Sistem	67.500.000	Bag. Pembangunan		
						022	Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem e-SAKIP	Jumlah Sistem yg dikembangkan	-	-	1 Sistem; 49 Orang	120.000.000	-	-	1 Sistem; 49 Orang	120.000.000	Bag. Ortala		
						022	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sistem	1 sistem	1 sistem informasi	-	121.054.300	-	-	1 sistem informasi	121.054.300	Bag. Pembangunan		
						022	Pengembangan Layanan Aplikasi LPSE	Jumlah Aplikasi	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	121.750.000	2 Aplikasi	221.750.000	1 Aplikasi	157.500.000	2 Aplikasi	501.000.000	Bag. Ortala
						022	Peningkatan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan	Jumlah Sistem	-	1 sistem	-	100.000.000	-	-	1 Sistem	100.000.000	Bag. Ortala		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0 2 2	0 6	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem E- Sakip	Jumlah Sistem yang dipelihara dan dikembangkan jumlah operator yang dilatih	-	-	-	-	1 Sistem; 76 Orang	115.000.000	1 Sistem; 76 Orang	115.000.000	Bag. Ortala	
						0 0 1		Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Admanistrasi Perkantoran	100%	100%	26.395.536.000	100%	24.465.392.000	100%	23.831.517.000	100%	74.692.445.000	
						0 0 1	0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan(listrik= 16 gedung; air = 7 gedung; telepon = 96 line)	listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line (12 bulan) : 3 rekening, telepon : 175 line)	8.290.000.000	12 bulan (listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line)	8.248.520.000	12 bulan (listrik : 40 rekening, air : 3 rekening, telepon : 175 line)	8.234.000.000	12 bulan (listrik : 25 rekening, air : 5 rekening, telepon : 160 line)	24.772.520.000	Bag. Umum
						0 0 1	0 2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	12 bulan; 166 orang	172 Orang; 12 bulan	10.487.150.000	172 Orang	9.500.000.000	167 Orang	9.435.000.000	12 bulan; 175 orang	29.422.150.000	Bag. Umum
						0 0 1	0 3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	90 Jenis ATK	84 Jenis ATK	1.081.400.000	79 Jenis ATK	566.897.000	73 Jenis	456.782.000	84 Jenis ATK	2.105.079.000	Bag. Umum
						0 0 1	0 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	61 Jenis cetakan	48 Jenis Cetak	1.066.800.000	30 Jenis Cetak	999.975.000	31 Jenis	850.000.000	48 jenis cetakan	2.916.775.000	Bag. Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4 Paket dan 5 Set	408.800.000	4 Paket dan 5 Set	400.000.000	5 set dan 1 Paket	350.000.000	5 set dan 1 Paket	1.158.800.000	Bag. Umum
						006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	12 bulan, 14 jenis	15 jenis; 12 bulan	465.990.000	15 jenis	450.000.000	17 jenis	457.478.000	17 jenis	1.373.468.000	Bag. Umum
						007	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	12 bulan	3 jenis	2.955.000.000	24 Paket	2.900.000.000	24 Paket	2.455.491.000	24 Paket	8.310.491.000	Bag. Umum
						008	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	200 OH DD; 888 OH LD	1.060 OH (DD : 250 OH dan LD : 810 OH)	1.640.396.000	966 OH (DD : 250 OH dan LD : 719 OH)	1.400.000.000	956 OH (DD : 250 OH dan LD 706 OH)	1.592.766.000	1.060 OH (DD : 250 OH dan LD : 810 OH)	4.633.162.000	Bag. Administrasi
						002	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>19.996.997.000</b>	<b>100%</b>	<b>14.553.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.355.027.000</b>	<b>100%</b>	<b>47.780.524.000</b>	
						001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	12 bulan, 10 gedung	14 gedung; 12 bulan	4.636.400.000	12 bulan, 15 gedung	3.000.000.000	14 Gedung	2.900.375.000	14 gedung; 12 bulan	10.536.775.000	Bag. Umum
						002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	12 bulan, 39 mobil dan 70 motor	45 Mobil, 96 Motor	1.267.500.000	12 bulan, 40 mobil dan 96 motor	1.260.500.000	42 mobil dan 100 motor; 5 Orang Pengemudi	1.465.000.000	42 mobil dan 100 motor; 5 Orang Pengemudi	3.993.000.000	Bag. Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						00203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan; 9 jenis	12 jenis; 12 bulan	3.173.000.000	12 bulan, 9 jenis	3.200.000.000	14 jenis	3.038.663.000	14 jenis	9.411.663.000	Bag. Umum
						00204	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Sewa Gedung; Jumlah Sewa Ruang Rapat/Serbaguna dan Sewa Kamar	12 bulan; 1 gedung	1 Gedung	208.200.000	12 bulan	200.000.000	1 Gedung	200.000.000	12 bulan	608.200.000	Bag. Umum
						00205	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah bahan PDH	7700 bahan PDH beserta atribut dan 45 stel PSL dan 6 stel PSH; 7704 badge	7700 Bahan Pakaian Pegawai; 3860 Kerudung; 3840 Selendang	1.928.600.000	5 jenis	2.176.000.000	210 stel ; 3 jenis	266.640.000	210 stel ; 3 jenis	4.371.240.000	Bag. Umum
						00207	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	12 bulan, 8 jenis	33 Jenis	3.186.700.000	12 bulan, 14 jenis	2.000.000.000	14 Jenis dan 2 Paket	2.103.504.000	14 Jenis dan 2 Paket	7.290.204.000	Bag. Umum
						00208	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	3 unit mobil	11 Mobil dan 8 Motor	4.217.847.000	3 (tiga) Mobil dan 5 (lima) Motor	1.342.000.000	4 unit Mobil, 5 unit Motor	2.363.475.000	11 Mobil dan 8 Motor	7.923.322.000	Bag. Umum
						00200	Penilaian Kelaikan Gedung	Jumlah Dokumen Kelaikan Gedung Kantor		-	-	1 Dokumen (2 Gedung)	150.000.000	-	-	1 Dokumen (9 Gedung)	150.000.000	Bag. Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						002	11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan, 11 jenis	11 jenis; 12 bulan	1.378.750.000	12 bulan, 11 jenis	1.100.000.000	13 jenis	1.017.370.000	13 jenis	3.496.120.000	Bag. Umum
						002	12 Penyediaan Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Jumlah Rumah Dinas	-	-	-	1 Unit	125.000.000	-	-	1 Unit	125.000.000	Bag. Umum
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pembangunan	Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana	80%	85%	90%	028	18 Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	665.061.000	100%	630.384.830	100%	692.079.200	100%	1.824.175.030	
						028	01 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12 dokumen	6 dokumen	61.591.000	8 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, DPA Setda, DPA KDH/WKDH, DPPA Setda, DPPA KDH/WKDH, RKT dan RKT Perubahan)	92.134.830	8 dokumen (Renja, Renja Perubahan, DPA Setda, DPA KDH/WKDH, DPPA Setda, DPPA KDH/WKDH, RKT dan RKT Perubahan)	95.000.000	8 dokumen (Renja, Renja Perubahan, DPA Setda, DPA KDH/WKDH, DPPA Setda, DPPA KDH/WKDH, RKT dan RKT Perubahan)	248.725.830	Bag. Administrasi
						028	03 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Bag. Administrasi
						028	04 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	88.000.000	1 dokumen	88.000.000	1 dokumen	70.500.200	3 dokumen	246.500.200	Bag. Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0280	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	2 Dokumen	2 Dokumen	177.140.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	174.798.000	6 Dokumen	531.938.000	Bag. Pembangunan
						0286	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	Jumlah Dokumen	1 dokumen; 20 orang; 100 orang ; 30 orang	1 Dokumen	156.980.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	140.645.000	3 Dokumen	457.625.000	Bag. Pembangunan
						0288	Pengawasan Batas Wilayah Kota Depok	Jumlah Dokumen Pengawasan Batas Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	93.000.000	1 dokumen	110.250.000	1 dokumen	86.136.000	3 dokumen	289.386.000	Bag. Pemerintahan
						0289	Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	-	1 dokumen	13.350.000	-	-	-	-	1 dokumen	13.350.000	Bag. Pemerintahan
						0280	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Jumlah Dokumen	-	1 dokumen	75.000.000	-	-	1 dokumen	75.000.000	2 dokumen	150.000.000	Bag. Pemerintahan
						0255	<b>Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Tingkat Kematangan ULP</b>	<b>Tingkat (initial)</b>	<b>Tingkat 3 (managed)</b>	<b>2.662.053.000</b>	<b>Tingkat 3 (managed)</b>	<b>2.930.507.900</b>	<b>Tingkat 3 (managed)</b>	<b>3.582.968.100</b>	<b>Tingkat 3 (managed)</b>	<b>5.776.223.000</b>	
						0251	Layanan Pengadaan barang / jasa	Jumlah paket pelaksanaan lelang	600 Paket	550 paket	1.452.004.900	-	-	-	-	550 paket	1.452.004.900	Bag. Layanan Pengadaan
						0225	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pokja Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan pengadaan	1 paket	4 Dokumen; 550 Dokumen	233.730.000	4 Dokumen; 550 Dokumen	220.500.000	4 Dokumen; 550 Dokumen	220.500.000	4 Dokumen; 550 Dokumen	674.730.000	Bag. Layanan Pengadaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0 2 5	0 3 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PPK; Jumlah Pejabat Pengadaan/ umlah PPHP yang dibina	1 (satu) sistem	139 orang; 60 orang; 30 orang	438.364.000	4 kali	399.952.000	4 kali	399.952.000	8 kali	1.238.268.000	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	0 4 Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil yang dinilai	60 orang	4 Orang	33.813.000	18 Orang	36.653.000	18 Orang	36.653.000	40Orang	107.119.000	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	0 5 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Jumlah peserta	-	40 orang 2 Kali	98.799.900	2 Kali 40 orang	110.000.000	2 Kali 40 orang	110.000.000	6 Kali 120 orang	318.799.900	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	0 6 Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen	2 kali, 90 orang	4 dokumen	61.861.800	-	-	-	-	40 orang 8 Kali	61.861.800	Bag. Pembangunan
						0 2 5	0 7 Penyelenggaraan Layanan E-Procurement (SPSE)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangkan di LPSE	-	550 Paket	343.479.400	550 Paket	350.000.000	550 paket	350.000.000	550 Paket	1.043.479.400	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	0 8 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	-	-	-	4 jenis	438.480.000	4 jenis	441.480.000	4 jenis	879.960.000	Bag. Layanan Pengadaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0 2 5	0 8	Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pelaksanaan lelang, Jumlah Persentase Lelang Secara Elektornik	-	-	550 paket,100 %	1.065.004.900	550 paket,100 %	1.498.205.100	550 paket,100 %	2.563.210.000	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	0 9	Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan	-	-	Level 4 (Strategis)	249.918.000	Level 4 (Strategis)	249.918.000	Level 4 (Strategis)	499.836.000	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 5	1 0	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan APBD Kota Depok; Jumlah kegiatan penyerapan anggaran terhadap 38 Perangkat Daerah	-	-	4 Dokumen; 4 kali	60.000.000	5 Dokumen; 4 kali	276.260.000	9 Dokumen; 8 kali	336.260.000	Bag. Layanan Pengadaan
						0 2 1		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Unit layanan terakreditasi	0%	100%	905.770.000	429.000.000	100%	381.355.800	100%	1.716.125.800	
						0 2 1	0 1	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah dokumen	0%	1 dokumen	57.200.000	58.000.000	1 dokumen	57.999.800	3 dokumen	173.199.800	Bag. Ortala

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0 2 1	0 2 1	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah	Jumlah Kecamatan yang dibina ; Jumlah kecamatan yang mengimple mentasikan SIM PATEN; Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	11 kali	11 kecamatan ; 2 kecamatan ;1 kali	233.000.000	11 kecamatan ; 2 kecamatan ;1 kali	150.000.000	11 kecamatan ; 3 kecamatan	124.098.000	11 kecamatan ; 2 kecamatan	507.098.000	Bag. Pemerintahan
						0 2 1	0 3	Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan	Jumlah Dokumen	0%	1 dokumen	130.000.000	2 dokumen	130.000.000	63 Kelurahan	103.514.000	63 Kelurahan	363.514.000	Bag. Pemerintahan
						0 2 1	0 4	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Jumlah Dokumen	1 dokumen (15 SPM)	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Laporan	12.000.000	3 Laporan	53.200.000	Bag. Ortala
						0 2 1	0 5	Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat	Jumlah Dokumen	0%	1 Dokumen	68.620.000	1 Dokumen	70.000.000	11 kecamatan	41.850.000	11 kecamatan	180.470.000	Bag. Pemerintahan
						0 2 1	0 6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE	Jenis sarana dan prasarana pendukung layanan LPSE; Jumlah scope ISO	-	5 jenis; 1 scope pelayanan ISO 27001	396.750.000	-	-	-	-	5 jenis; 1 scope pelayanan ISO 27001	396.750.000	Bag. Pemerintahan
						0 2 1	0 7	Sinergitas Pelayanan Publik	Jumlah Peserta yang Dilatih; Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	-	-	-	-	-	320 orang; 16 kali	41.894.000	320 orang; 16 kali	41.894.000	Bag. Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						005	Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	43%	45%	598.438.500	47%	268.906.200	48%	252.757.000	48%	1.120.101.700	
						005	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Personel UKPBJ	Jumlah Peserta	2 kali	32 orang; 2 kali	177.461.000	32 orang; 2 kali	200.000.000	35 Orang	149.861.000	101 orang, 4 kali	527.322.000	Bag. Layanan Pengadaan
						005	Bimbingan Teknis Standar Operasional prosedur (SOP)	Jumlah Peserta	-	40 orang	109.058.000	-	-	-	-	40 orang	109.058.000	Bag. Ortala
						005	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok	Jumlah peserta	-	50 orang; 2 hari	64.100.000	50 orang; 2 hari	68.906.200	40 orang	102.896.000	140 orang ; 2 hari	235.902.200	Bag. Ortala
						005	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Setda	Jumlah Peserta	60 orang	40 orang	147.819.500	-	-	-	-	40 orang	147.819.500	Bag. Administrasi
						005	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Jumlah Peserta	90 orang	45 orang;1 kali	100.000.000	-	-	-	-	45 orang;1 kali	100.000.000	Bag. Promentasi
						030	Peningkatan Layanan KDH / WKDH	Cakupan Layanan KDH/ WKDH	100%	100%	7.128.495.409	100%	7.428.450.000	100%	8.236.776.000	100%	22.793.721.409	
						030	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok	Jumlah Pendampingan KDH/ WKDH	273 keprotokol-an; 3 Paket Pakaian Kerja	365Kali	1.012.000.000	365 Kali	1.200.000.000	720 Kali	1.752.952.000	1.450 kali	3.964.952.000	Bag. Promentasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						030	Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH	Jumlah dokumentasi	12 buku dokumentasi foto; 12 buku dokumentasi release; 200 lembar sticker; 1 Paket (4 Buah Baliho)	24 Buku Dokumentasi Foto; 24 Buku Dokumentasi Release; 120 Keping CD Dokumentasi KDH/WKDH	820.688.000	24 Buku Dokumentasi; Release; 24 Buku Dokumentasi Foto; 100 Keping CD Dokumentasi KDH/WKDH	750.000.000	24 Buku Dokumentasi Foto; 24 Buku Dokumentasi Release;	900.000.000	72 Buku Dokumentasi; Release; 72 Buku Dokumentasi Foto; 300 Keping CD Dokumentasi KDH/WKDH	2.470.688.000	Bag. Promentasi
						030	Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH	Jumlah Media Advetorial	63 adv; 1 Paket (Pembuatan CD Selayang Pandang Kota Depok)	324 Adv Media Massa; 2 adv media nasional	1.004.728.000	47 Adv Media Massa; 1 Kali Pameran Foto	330.750.000	2 adv di media nasional	995.000.000	373 Adv Media Massa; 3 Kali Pameran Foto	2.330.478.000	Bag. Promentasi
						030	Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH	Jumlah peserta	1 kali sosialisasi (500 orang peserta)	500 Peserta; 1 Kali	279.949.900	500 Peserta; 1 Kali	385.875.000	500 Peserta; 1 Kali	270.000.000	1.500 Peserta; 3 Kali	935.824.900	Bag. Promentasi
						030	Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik	Jumlah Naskah Pidato, Makalah dan kertas kerja	59400 eks koran; 480 eks majalah; 12 dokumen Kliping; 600 buku sambutan	59.400 Ex Surat Kabar, 480 Majalah, 650 Buku Sambutan, 1.250 Kantong, 100 Buku	602.499.800	44.192 Ex Surat Kabar, 480 Majalah, 650 Buku Sambutan, 1250 Kantong, 100 Buku	645.750.000	-	-	103.592 Ex Surat Kabar, 1920 Majalah, 2550 Buku Sambutan, 3750 Kantong, 300 Buku	1.248.249.800	Bag. Promentasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						030	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)	Jumlah Kunjungan Kerja dan Konsultasi Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	Dalam Daerah = 512 OH; Luar Daerah = 312 OH; Luar Negeri = 0 kali	670 OH Dalam Daerah, 358 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	1.001.249.609	512 OH Dalam Daerah, 312 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	840.000.000	360 OH Dalam Daerah, 210 OH Luar Daerah, 1 Luar Negeri	550.000.000	1.542 OH Dalam Daerah, 12 48 OH Luar Daerah, 3 Luar Negeri	2.391.249.609	Bag. Promentasi
						037	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH	Jumlah peserta	8 orang	4 (empat) orang peserta	26.500.000	4 (empat) orang peserta	27.825.000	4 Orang	27.825.000	4 (empat) orang peserta	82.150.000	Bag. Promentasi
						038	Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah pelaksanaan pelayanan kedinasan	12 bulan	12 bulan	248.196.000	12 bulan	432.600.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	2.180.796.000	Bag. Promentasi
						039	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah Pakaian Dinas	9 jenis pakaian dinas KDH/WKDH	5 Jenis Pakaian Dinas, 2 jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	211.184.900	8 Jenis Pakaian Dinas dan 1 jenis Topi	230.000.000	5 Jenis Pakaian Dinas, 2 Jenis pakaian Dinas hari-hari tertentu	230.000.000	8 Jenis Pakaian Dinas dan 1 jenis Topi	671.184.900	Bag. Promentasi
						030	Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH	Jumlah Penyediaan makan minum	0	264 kali jamuan	178.050.000	120 kali jamuan tamu KDH/WKDH; 264 kali makanan harian KDH dan WKDH	185.000.000	264 kali jamuan	185.000.000	792 kali jamuan	548.050.000	Bag. Promentasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						030	11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan, 2 Unit Rumah	2 unit rumah (12 bulan )	39.400.000	12 Bulan, 2 Unit Rumah	43.050.000	2 paket	41.000.000	12 Bulan, 2 Unit Rumah	123.450.000	Bag. Umum
						030	12 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH	Jumlah jenis logistik rumah tangga (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih, mamin tamu, mamin rumah tangga dan honorarium non PNSD)	5 jenis (12 bulan)	3 jenis (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih; mamin tamu dan mamin rumah tangga; honorarium Non PNSD)	742.100.000	5 jenis (12 bulan)	793.800.000	2 Jenis	810.000.000	5 jenis (12 bulan)	2.345.900.000	Bag. Umum
						030	13 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Jabatan	8 jenis	2 Jenis	246.500.000	4 Jenis	770.000.000,00	14 Jenis	249.999.000	4 Jenis	1.266.499.000	Bag. Umum
						030	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah rumah dinas	12 Bulan, 2 Unit Rumah	2 Unit Rumah (12bulan )	220.199.500	12 Bulan, 2 Unit Rumah	242.550.000,00	2 Unit Rumah	225.000.000	12 Bulan, 2 Unit Rumah	687.749.500	Bag. Umum
						030	15 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH	Jumlah Rumah Dinas	12 Bulan, 2 Unit	2 Unit ( 12 bulan )	395.049.900	12 Bulan, 2 Unit	441.000.000,00	2 Unit Rumah	400.000.000	12 Bulan, 2 Unit	1.236.049.900	Bag. Umum
						030	16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah perlengkapan Rumah Dinas	12 bulan; 2 rumah	5 jenis (12 bulan )	100.199.800	12 Bulan, 5 jenis	110.250.000,00	6 Jenis	100.000.000	12 Bulan, 5 jenis	310.449.800	Bag. Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	100%	100%	100%	026	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	785	450	2.444.420.100	450	2.523.750.320	450	1.771.442.700	1800	6.739.613.120	
						021	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	785 produk hukum	450 Produk Hukum	577.779.300	450 Produk Hukum	314.999.900	450 Produk Hukum	315.000.000	1.350 produk hukum	1.207.779.200	Bag. Hukum
						022	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan	1980 produk hukum	1000 salinan perda; 500 salinan perwa	395.559.800	1000 salinan perda; 500 salinan perwa	394.999.720	1000 salinan perda; 500 salinan perwa	395.000.000	3.000 salinan perda; 1500 salinan perwa	1.185.559.520	Bag. Hukum
						023	Pemantauan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM	Jumlah Peserta Seminar	-	50 Orang; 1 Kali;	137.899.800	50 Orang; 1 Kali; 4 Kali, 12 Bulan	137.999.800	50 Orang; 3 Kali	87.803.900	150 orang; 5 Kali	363.703.500	Bag. Hukum
						024	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta/ penyuluhan	12 kali penyuluhan	60 orang, 10 kali	273.207.700	60 orang, 10 kali	269.999.800	-	-	120 orang, 20 kali	543.207.500	Bag. Hukum
						025	Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum yang terbentuk dan Jumlah Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum	125 peserta	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	99.024.800	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	99.999.900	-	-	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	199.024.700	Bag. Hukum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						026	Pembinaan Legal Drafting	Jumlah Peserta	-	100 Orang	80.800.000	100 Orang	89.999.800	100 Orang	90.000.000	300 Orang	260.799.800	Bag. Hukum
						027	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan	Jumlah Perkara yang ditangani	12 perkara	5 perkara	440.039.900	5 perkara	439.999.000	5 perkara	449.888.000	15 perkara	1.329.926.900	Bag. Hukum
						028	Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi	Jumlah Perkara yang ditangani	6 kasus	5 perkara	289.859.800	5 perkara	279.999.900	5 perkara	181.631.000	15 perkara	751.490.700	Bag. Hukum
						029	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi; Jumlah peserta	-	50 orang ; 6 kali	150.249.000	6 kali; 50 orang	149.999.900	3 kali; 25 orang	87.119.900	15 kali; 125 orang	387.368.800	Bag. Hukum
						020	Penanganan Perkara Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	Jumlah Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	-	-	-	12 perkara	164.592.000	12 Perkara	164.999.900	12 Perkara	329.591.900	Bag. Hukum
						021	Penyusunan Perda ttg Perubahan Perda Kota Depok No. 10 Thn. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok	Jumlah Dokumen	-	-	-	1 dokumen	181.160.600	-	-	1 dokumen	181.160.600	Bag. Hukum



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab										
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)											
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)													
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	85%	90%	100%	1	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif	-	210 orang	6.140.106.900	210 orang	5.935.734.700	217 orang	5.871.000.000	217 orang	17.946.841.600	Bag. Kesos										
						2				210 orang ; 210 orang		1.429.158.000		210 orang		1.300.000.000			240 orang	1.460.000.000	660 orang	4.189.158.000						
						5				1		0		Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok		Jumlah Kegiatan Bimbingan Rohani			43 kali	42 kali; 1 dokumen	126.604.000	42 kali	51.999.800	-	-	84 kali; 1 dokumen	178.603.800	Bag. Kesos
						2				3		0		Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok		Jumlah Aparatur			60 orang	100 Orang	127.525.000	100 Orang	127.999.900	100 Orang	128.000.000	100 Orang	383.524.900	Bag. Kesos
						5				1		0		Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok		Jumlah Peserta			75 Orang; 48 orang; 130 orang	100 orang	167.824.000	100 orang	168.000.000	100 Orang	168.000.000	300 orang	503.824.000	Bag. Kesos
						2				5		0		Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat		Jumlah Peserta			37 orang	16 orang	600.309.900	42 orang	776.100.000	-	-	58 orang	1.376.409.900	Bag. Kesos
						5				1		0		Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok		Jumlah Kegiatan			2 kali kegiatan	2 kali; 5 orang	1.233.736.000	2 Kegiatan (Pemberangkatan dan Pemulangan)	1.233.736.000	2 Kegiatan (Pemberangkatan dan Pemulangan)	1.235.000.000	2 Kegiatan (Pemberangkatan dan Pemulangan)	3.702.472.000	Bag. Kesos
						2				7		0		Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok		Jumlah Peserta			462 Orang; 3 hari	462 Orang	877.590.000	462 Orang	900.000.000	462 Orang	900.000.000	1848 Orang	2.677.590.000	Bag. Kesos

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab	
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						1 2 5	0 8	Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	30 hari; 1 kali; 10 hari	311.360.000	3 Kegiatan (Buka Puasa Bersama, Malam Nuzulul Qur'an, dan Iqtikaf 10 hari terakhir)	325.000.000	3 Kegiatan (Buka Puasa Bersama, Malam Nuzulul Qur'an, dan Iqtikaf 10 hari terakhir)	325.000.000	3 Kegiatan (Buka Puasa Bersama, Malam Nuzulul Qur'an, dan Iqtikaf 10 hari terakhir)	961.360.000	Bag. Kesos
						1 2 5	0 9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Depok	Jumlah pelaksanaan kegiatan pada hari besar keagamaan;	10 acara; ; 217 orang	8 Kali ; 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing	1.266.000.000	8 acara; 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing	1.052.899.000	8 Acara (Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idhul Adha, Penyembelian Hewan Kurban, Idul Fitri, Halal Bihalal, Natal);	1.055.000.000	8 Acara (Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idhul Adha, Penyembelian Hewan Kurban, Idul Fitri, Halal Bihalal, Natal);	3.373.899.000	Bag. Kesos
						1 2 5	1 0	Pengiriman Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	20 Orang	600.000.000	20 Orang	600.000.000	Bag. Kesos



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator			Kode	Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		Unit Penanggung jawab
			2019	2020	2021					2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
										Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1 2 7	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	Pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan dan masyarakatan	-	100%	740.554.800	100%	788.980.700	100%	763.190.900	100%	2.292.726.400	
						1 2 7	0 Bimbingan Teknis bagi Pengurus DKM	Jumlah Pengurus DKM	170 orang	170 Orang	112.984.000	170 Orang	113.982.000	170 Orang	115.000.000	510 Orang	341.966.000	Bag. Kesos
						1 2 7	0 Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf	Jumlah Peserta	200 orang	300 Orang	191.710.800	300 Orang	199.999.800	300 Orang	147.440.000	900 Orang	539.150.600	Bag. Kesos
						1 2 7	0 Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Pelaksanaan Rakor Tingkat Kota;	-	3 Kali; 33 orang	303.860.000	3 Kali; 33 orang	324.999.000	3 Kali; 33 orang	350.750.900	9 Kali; 99 orang	979.609.900	Bag. Kesos
						1 2 7	0 Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Pembinaan	8 kegiatan KPA dan TP-UKS	5 Kali Rakor UKS 1 Kali Pembinaan UKS	132.000.000	5 Kali Rakor UKS 1 Kali Pembinaan UKS	149.999.900	5 Kali Rakor UKS ; 1 Kali Pembinaan UKS	150.000.000	15 Kali Rakor UKS ; 3 Kali Pembinaan UKS	431.999.900	Bag. Kesos

## **BAB-VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Kota melalui Walikota setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP 5 (lima) tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya, kinerja perangkat daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja akhir periode Renstra perangkat daerah.

Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukurannya setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan.

Dalam Menyusun Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai target kinerja dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Target Kinerja RPJMD Kota Depok.

Untuk Tahun 2016-2021 Sekretariat Daerah Kota Depok berkontribusi dalam pencapaian Misi Pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 7.1 dan 7.2 dibawah ini.

Tabel. 7.1.2

Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021

Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Perubahan RPJMD	Perubahan Kedua Renstra		2019	2020	2021	
1	2	3	5	6	7	8
Predikat/ Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	CC	B	BB	A	A
	Predikat LPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan tidak tumpang tindih/cacat hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Dialog dan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	75%	85%	90%	100%	100%
Fasilitasi Umat Beragama	Persentase pembinaan lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan	60%	70%	75%	80%	80%

**Tabel. 7.1.2**  
**Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021**

No	Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Per tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	
1.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	BB	A	A
2.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Hasil capaian kinerja pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase perangkat daerah yang capaian fisiknya diatas 75%	75%	90%	95%	100%	100%
3.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan <i>e-government</i> yang terintegrasi	N/A	30%	40%	50%	50%
4.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Per tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan ULP	Tingkat 1 <i>(initial)</i>	Tingkat 3 <i>(managed)</i>	Tingkat 3 <i>(managed)</i>	Tingkat 3 <i>(managed)</i>	Tingkat 3 <i>(managed)</i>
8.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit layanan terakreditasi	N/A	100%	100%	100%	100%
9.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	43%	45%	47%	48%	48%
10.	Peningkatan Layanan KDH dan WKDH	Cakupan layanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Per tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	
11.	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	785	450	450	450	1800
12.	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif	N/A	210 org	210 org	217 org	217 org
13.	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan dan kemasyarakatan	N/A	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah sasaran Sekretariat Daerah adalah sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sasaran. Adapun yang dapat dijadikan sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Daerah adalah sebanyak 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran sesuai fungsi Sekretariat Daerah. Hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.

## BAB-VIII

# PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Depok. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kota Depok.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah.

Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

selaku

**KEPALA PERANGKAT DAERAH**

